

**PERANAN MEDIATOR DALAM PENYELESAIAN SENGKETA  
KEWARISAN PADA PENGADILAN AGAMA SENGKANG KELAS I B**



**Skripsi**

Diajukan untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Meraih Gelar Sarjana Hukum (S.H.)  
Prodi Hukum Acara Peradilan dan Kekeluargaan Jurusan Peradilan  
pada Fakultas Syariah dan Hukum  
UIN Alauddin Makassar

**Oleh:**

**ANDI MUSFIRA ASNUR**  
**NIM: 10100113063**

**FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM  
UIN ALAUDDIN MAKASSAR  
2017**

## PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Mahasiswa yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Andi Musfira Asnur  
NIM : 10100113063  
Jurusan : Peradilan Agama  
Fakultas : Syariah dan Hukum  
Tempat/tgl. Lahir : Talabangi 03 Mei 1995  
Alamat : Pr. Taman Zarindah Tamarunang Blok H/19.  
Judul Skripsi : Peranan Mediator Dalam Penyelesaian Sengketa Kewarisan  
Pada Pengadilan Agama Sengkang Kelas I B.

Menyatakan dengan sesungguhnya dan penuh kesadaran bahwa skripsi ini benar adalah hasil karya sendiri. Jika di kemudian hari terbukti bahwa ia merupakan duplikat, tiruan, plagiat, atau dibuat oleh orang lain, sebagian ataupun seluruhnya, maka skripsi dan gelar yang diperoleh karenanya batal demi hukum.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI

ALA UDDIN  
MAKASSAR

Samata, 18 Juli 2017



ANDI MUSFIRA ASNUR  
NIM : 10100113063

## PENGESAHAN SKRIPSI

Skripsi yang berjudul "PERANAN MEDIATOR DALAM PENYELESAIAN SENGKETA KEWARISAN PADA PENGADILAN AGAMA SENGKANG KELAS 1 B" yang disusun oleh Andi Musfira Asnur, NIM: 10100113063, mahasiswa Prodi Hukum Acara Peradilan dan Kekeluargaan, Jurusan Peradilan pada Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Alauddin Makassar, telah diuji dan dipertahankan dalam sidang *munāqasyah* yang diselenggarakan pada hari Senin, tanggal 14 Agustus 2017 M, bertepatan dengan tanggal 21 Zulkaidah 1438 H, dinyatakan telah dapat diterima sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H.) dalam Ilmu Syari'ah dan Hukum, Jurusan Peradilan (dengan beberapa perbaikan).

Makassar, 18 Agustus 2017 M  
25 Zulkaidah 1438 H

### DEWAN PENGUJI:

Ketua	: Prof. Dr. Darussalam S., M.Ag.	(.....)
Sekretaris	: Dr. H. Abd. Halim Talli, M.Ag.	(.....)
Munaqisy I	: Drs. Hadi Daeng Mapuna, M.Ag.	(.....)
Munaqisy II	: Dr. H. Jamal Jamil, M.Ag.	(.....)
Pembimbing I	: Dr. H. Supardin, M.H.I.	(.....)
Pembimbing II	: Dr. Hj. Patimah, M.Ag.	(.....)

Disahkan oleh:

Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum  
UIN Alauddin Makassar,



Prof. Dr. Darussalam Syamsuddin, M.Ag.  
NIP. 196210161990031003

## KATA PENGANTAR

بسم الله الرحمن الرحيم

Assalamu'alaikum wr.wb.

الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدين والدين. الشهد ان لا اله الا الله و اشهد ان

محمد رسول الله. اللهم صل وسلم على محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. اما بعد

Puji syukur kehadiran Allah swt yang telah memberikan nikmat, rahmat, dan hidayah-Nya, serta salawat dan salam kepada Nabi Muhammad saw. Yang telah membawa kita alam kegelapan menuju alam terang benderang. Atas Ridha-Nya dan doa yang disertai dengan usaha yang maksimal setelah melalui proses yang panjang dan melelahkan akhirnya skripsi ini dapat diselesaikan.

Keberadaan skripsi ini bukan sekedar persyaratan formal bagi mahasiswa untuk mendapat gelar sarjana, tetapi lebih dari itu juga merupakan wadah pengembang ilmu yang didapat di bangku kuliah dan merupakan kegiatan penelitian sebagai unsur Tri Darma Perguruan Tinggi. Dalam mewujudkan ini, penulis memilih judul **“Peranan Mediator Dalam Penyelesaian Sengketa Kewarisan Pada Pengadilan Agama Sengkang Kelas I B”**. semoga kehadiran skripsi ini dapat memberikan informasi dan dijadikan referensi terhadap pihak-pihak yang menaruh minat pada masalah ini. Dalam kegiatan perkuliahan dan penyusunan skripsi ini, penulis banyak menerima bantuan, motivasi dan bimbingan serta tersedianya fasilitas-fasilitas yang diberikan oleh beberapa pihak. sehingga kendala dan hambatan tersebut dapat diatasi dengan baik.

Berkenaan dengan itu penulis patut mengucapkan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada kedua orang tua penulis. Yaitu, Ayahanda **Andi Asri S.Pd** dan Ibunda **Dra. ST. Nurhayati**, yang dengan penuh kasih sayang, pengertian dan diiringi doanya telah mendidik dan membesarkan serta mendorong penulis hingga sekarang menjadi seperti ini. Tak lupa saudara/i kandung Andi Nurul Fikria, Andi Ashabul Kahfi, Andi Asmaul Husna, Andi Lutfi Hidayat, juga segenap keluarga tercinta yang telah memberikan motivasi sehingga penulis dapat menyusun skripsi ini.

Demikian pula ucapan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya penulis sampaikan kepada:

1. Ayahanda Prof. Dr. Musafir Pababbari, M.Si., selaku Rektor UIN Alauddin Makassar. Serta para Wakil Rektor beserta seluruh staf dan karyawannya.
2. Ayahanda Prof. Dr. Darussalam Syamsuddin, M.Ag., selaku Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum, serta para Wakil Dekan dan jajarannya yang sudah turut berperan serta dan membantu saya atas penyelesaian skripsi ini. Kalaupun saya tidak menyebutkan nama, itu tidak mengurangi penghargaan saya kepada mereka. Semoga bantuan mereka berikan kepada saya menjadi amal baik dan amal salih mereka.
3. Ayahanda Dr. H. Supardin M.Hi., selaku Ketua Jurusan Peradilan Agama. Yang telah membina dan membimbing penulis selama perkuliahan hingga penyelesaian skripsi ini.
4. Ibunda Dr. Hj. Patimah, M.Ag., selaku Sekertaris Jurusan Peradilan Agama sekaligus pembimbing II, dan Ibunda Dr. Hj. Nurnaningsih, M.A Selaku Pembimbing I Yang telah membimbing dan membina penulis dengan setulus hati sehingga skripsi ini selesai.
5. Seluruh Dosen dan staf Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Alauddin Makassar yang telah banyak memberi bimbingan selama penulis menempuh kegiatan akademik di Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Alauddin Makassar.
6. Kepala Perpustakaan pusat UIN Alauddin Makassar, beserta seluruh stafnya dan karyawan yang telah meminjamkan buku-buku literatur yang dipergunakan penulis dalam menyelesaikan skripsi.
7. Ketua Pengadilan Agama Sengkang Dra. Hj. Rudianah Halim, S.H., yang telah memberikan kesempatan untuk melakukan penelitian di Pengadilan Agama Sengkang.
8. Bapak Drs. H. Makka A (Hakim), yang telah membimbing penulis dalam melakukan penelitian.
9. Drs. Idris M.HI (Hakim), yang telah memberikan informasi kepada penulis.
10. Segenap Pegawai dan Staf Pengadilan Agama Sengkang yang telah memberikan informasi ataupun data-data yang penulis perlukan selama melakukan penelitian.
11. Terima kasih kepada Andi Wahyudi terima kasih atas waktu dan kesempatan yang selama ini telah membantu dan memberi support untuk menyelesaikan skripsi ini, serta telah menemani mulai dari nol sampai selesainya skripsi ini, yakni mulai dari Seminar Proposal, Penelitian Seminar Hasil, Ujian Komprehensif, telah dilewati bersama-sama.
12. Kepada Keluarga besar ku Rosnawati S.Pd, Anugrahwati S.Pd, Adnan Haddis S.Ag, MH, Juhais S.Ag, Dra. St. Surdiati, Haddis, dan Intang terima kasih

atas cinta, kasih sayang, materi, doa, dan dukungan yang telah diberikan kepada penulis sehingga selesainya skripsi ini.

13. Kepada sahabat-sahabatku Mutmainnah Akis, Ramlah, Sartika, Wiwiyanti, Reskiani, Suriani Nur, Irmha Erviana, Siti Wulandari yang telah membantu dan memberi motivasi dalam menyelesaikan skripsi ini.
14. Kepada seluruh teman-teman seperjuangan angkatan 2013 khususnya Peradilan Agama B, terima kasih atas dorongan dan semangat yang diberikan.
15. Kepada teman-teman KKN Angkatan 53 Kelurahan Tamallayang Kec.Bontonompo Nurizka Rayhana, Diah Rismayani, Dewi Fitriana, Agus Ryanto, Suharmin Syukur terima kasih atas kerjasamanya selama menjalankan pengabdian kepada masyarakat.
16. Kepada adikku Zulfadhilah Ismail yang selalu memberikan dukungan dan motivasi dalam menyelesaikan skripsi ini.
17. Kepada teman-teman alumni Madrasah Aliyah As'adiyah Putri Sengkang angkatan 2010 khususnya Uswatun Hasanah, Susi Susanti, Rezki Arsita Dasri, Nur Asma, Nurhikmah Jufri, Irdyanti yang selalu memberikan motivasi dan dukungannya untuk penulis.
18. Kepada semua pihak yang telah memberikan bantuan yang tidak sempat penulis sebut satu persatu semoga bantuan yang diberikan bernilai ibadah di sisi Allah swt.

Penulis menyadari bahwa dalam penyusunan skripsi ini masih jauh dari bentuk kesempurnaan. Olehnya itu, penulis berlapang dada untuk menerima kritik dan saran dari semua pihak demi kesempurnaan skripsi yang akan datang.

Akhir kata, penulis berharap dalam penyusunan skripsi ini dapat bermanfaat khususnya bagi diri pribadi dan pembaca pada umumnya.

Samata, 18 Juli 2017  
Penyusun,

**ANDI MUSFIRA ASNUR**  
**NIM: 10100113063**

## DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL .....	i
HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI .....	ii
PENGESAHAN SKRIPSI .....	iii
KATA PENGANTAR .....	iv
DAFTAR ISI .....	vii
PEDOMAN TRANSLITERASI .....	ix
ABSTRAK .....	xiv
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Fokus Penelitian dan Deskripsi Fokus .....	11
C. Rumusan Masalah .....	13
D. Kajian Pustaka.....	14
E. Tujuan dan Kegunaan Penelitian .....	16
BAB II TINJAUAN TEORETIS	
A. Mediator Dalam Lembaga Peradilan Agama .....	18
1. Pengertian Mediasi dan Mediator .....	18
2. Dasar Hukum Mediasi dan Mediator .....	20
3. Fungsi dan Tujuan Mediator .....	20
4. Kewajiban Mediator .....	21
5. Peranan Mediator .....	22
B. Kewarisan Dalam Islam .....	23
1. Pengertian dan Dasar Hukum Kewarisan Islam.....	23
2. Sumber-sumber Hukum Kewarisan Islam .....	28
3. Asas-asas Kewarisan .....	35
4. Unsur-unsur Kewarisan.....	42
5. Bagian-bagian Yang Diterima Ahli Waris .....	43
BAB III METODOLOGI PENELITIAN	



A. Jenis dan Lokasi Penelitian .....	47
B. Pendekatan Penelitian .....	48
C. Sumber Data .....	48
D. Metode Pengumpulan Data .....	49
E. Instrumen Penelitian .....	50
F. Teknik Pengolahan dan Analisis Data .....	51
 BAB IV MEDIASI DALAM PENYELESAIAN SENGKETA KEWARISAN PADA PENGADILAN AGAMA SENGKANG KELAS I B	
A. Gambaran Umum Pengadilan Agama Sengkang .....	54
B. Proses Yang Dilakukan Oleh Mediator Dalam Menyelesaikan Sengketa Kewarisan di Pengadilan Agama Sengkang Kelas I B .....	59
C. Efektivitas Yang Dicapai Mediator Dalam Menyelesaikan Sengketa Kewarisan Pada Pengadilan Agama Sengkang Kelas I B .....	69
D. Peranan Mediator Dalam Penyelesaian Sengketa Kewarisan Pada Pengadilan Agama Sengkang Kelas I B .....	74
 BAB V PENUTUP	
A. Kesimpulan .....	78
B. Implikasi Penelitian .....	79
DAFTAR PUSTAKA .....	80
 LAMPIRAN-LAMPIRAN	
DAFTAR RIWAYAT HIDUP	



## PEDOMAN TRANSLITERASI

### 1. Konsonan

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	ba	b	Be
ت	ta	t	Te
ث	sa	ṡ	es (dengan titik di atas)
ج	jim	j	Je
ح	ha	ḥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	kha	kh	ka dan ha
د	dal	d	De
ذ	zal	ẓ	zet (dengan titik di atas)
ر	ra	r	Er
ز	zai	z	Zet
س	sin	s	Es
ش	syin	sy	es dan ye
ص	sad	ṣ	es (dengan titik di bawah)
ض	dad	ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	ta	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	za	ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	‘ain	‘	apostrop terbalik

غ	gain	g	Ge
ف	fa	f	Ef
ق	qaf	q	Qi
ك	kaf	k	Ka
ل	lam	l	El
م	mim	m	Em
ن	nun	n	En
و	wau	w	We
ه	ha	h	Ha
ء	hamzah	,	Apostop
ي	ya	y	Ye

Hamzah yang terletak di awal kata mengikuti vokalnya tanpa diberi tanda apapun. Jika ia terletak di tengah atau di akhir, maka ditulis dengan tanda (ء).

## 2. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri atas vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut :

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
َ	<i>Fathah</i>	a	A
ِ	<i>Kasrah</i>	i	I
ُ	<i>Dammah</i>	u	U

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu :

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
يَ	fathah dan ya	ai	a dan i
وَ	fathah dan wau	au	a dan u

### 3. Maddah

*Maddah* atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu :

Harkat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda	Nama
يَ	<i>fathah dan alif atau ya</i>	ā	a dan garis di atas
يِ	<i>kasrah dan ya</i>	i	i dan garis di atas
يُ	<i>dammah dan wau</i>	ū	u dan garis di atas

### 4. Ta Marbutah

*Transliterasi* untuk *ta marbutah* ada dua, yaitu: *ta marbutah* yang hidup atau mendapat harkat *fathah*, *kasrah*, dan *dammah*, yang transliterasinya adalah [t]. Sedangkan *ta marbutah* yang mati atau mendapat harkat sukun transliterasinya adalah [h].

Kalau pada kata yang berakhir dengan *ta marbutah* diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang al- serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka *ta marbutah* itu transliterasinya dengan [h].

5. Syaddah (Tasydid)

*Syaddah* atau *tasydid* yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda *tasydid* (ّ), dalam transliterasinya ini dilambangkan dengan perulangan huruf (konsonan ganda) yang diberi tanda *syaddah*.

Jika huruf ي ber-*tasydid* di akhir sebuah kata dan didahului oleh huruf *kasrah* (ـِ), maka ia ditransliterasikan seperti huruf *maddah*(i).

6. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf ل (alif lam ma'arifah). Dalam pedoman transliterasi ini, kata sandang ditransliterasi seperti biasa, al-, baik ketika ia di ikuti oleh huruf syamsiah maupun huruf qamariah. Kata sandang tidak mengikuti bunyi huruf langsung yang mengikutinya. Kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya dan dihubungkan dengan garis mendatar (-).

7. Hamzah

Aturan transliterasi huruf hamzah menjadi apostrop (') hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan akhir kata. Namun, bila hamzah terletak di awal kata, ia tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab ia berupa alif.

8. Penulisan Kata Arab yang Lazim digunakan dalam Bahasa Indonesia

Kata, istilah atau kalimat Arab yang ditransliterasi adalah kata, istilah atau kalimat yang sudah lazim dan menjadi bagian dari perbendaharaan bahasa Indonesia, atau sudah sering ditulis dalam tulisan bahasa Indonesia, tidak lagi ditulis menurut cara transliterasi di atas. Misalnya kata *Al-Qur'an* (dari al-Qur'an), *sunnah*, *khusus* dan *umum*. Namun, bila kata-kata tersebut

menjadi bagian dari satu rangkaian teks Arab, maka mereka harus ditransliterasi secara utuh.

#### 9. Lafz al-Jalalah (الله)

Kata “Allah” yang didahului partikel seperti huruf *jarr* dan huruf lainnya atau berkedudukan sebagai *mudaf ilaih* (frase nominal), ditransliterasi tanpa huruf hamzah.

Adapun *ta marbutah* di akhir kata yang disandarkan kepada *lafz al-jalalah*, ditransliterasi dengan huruf [t].

#### 10. Huruf Kapital

Walau sistem tulisan Arab tidak mengenal huruf kapital (*All caps*), dalam transliterasinya huruf-huruf tersebut dikenai ketentuan tentang penggunaan huruf kapital berdasarkan pedoman ejaan Bahasa Indonesia yang berlaku (EYD). Huruf kapital, misalnya, digunakan untuk menuliskan huruf awal nama dari (orang, tempat, bulan) dan huruf pertama pada permulaan kalimat. Bila nama diri didahului oleh kata sandang (al-), maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya. Jika terletak pada awal kalimat, maka huruf A dari kata sandang tersebut menggunakan huruf kapital (AL-). Ketentuan yang sama juga berlaku untuk huruf awal dari judul referensi yang didahului oleh kata sandang al-, baik ketika ia ditulis dalam teks maupun dalam catatan rujukan (CK,DP, CDK, dan DR).

## ABSTRAK

NAMA : ANDI MUSFIRA ASNUR

NIM : 10100113063

JUDUL : PERANAN MEDIATOR DALAM PENYELESAIAN SENGKETA  
KEWARISAN PADA PENGADILAN AGAMA SENGKANG  
KELAS I B

---

Skripsi ini membahas tentang bagaimana peranan mediator dalam penyelesaian sengketa kewarisan pada Pengadilan Agama Sengkang Kelas I B. Hal ini disebabkan kurangnya kepercayaan masyarakat terhadap lembaga peradilan yang dianggap lamban dan berbelit-belit dalam menyelesaikan perkara, oleh karena itu perlu dicarikan alternatif penyelesaian sengketa di pengadilan yang efisien dan efektif serta para pihak sama-sama merasa menang, tidak ada pihak yang merasa dikalahkan. Dengan adanya mediasi yang dilakukan oleh mediator maka kemungkinan besar mampu mendamaikan pihak yang bersengketa.

Jenis Penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field research*), dengan pendekatan yang digunakan yaitu pendekatan legalitas formal dan pendekatan sosial. Data ini diperoleh dari hakim, mediator, dan staf administrasi Pengadilan Agama Sengkang. Metode pengumpulan data yang digunakan adalah observasi, wawancara, dokumentasi dan penelusuran berbagai literatur atau referensi. Teknik pengolahan dan analisis data dilakukan melalui tiga tahapan, yaitu: reduksi data, display data dan penarikan kesimpulan.

Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa peranan mediator dalam penyelesaian sengketa kewarisan pada Pengadilan Agama Sengkang Kelas I B memiliki peranan penting dalam melaksanakan proses mediasi berdasarkan hasil wawancara dengan para hakim selaku mediator di Pengadilan Agama Sengkang Kelas I B. Hanya saja hasil/efektivitas yang dicapai mediator dalam menyelesaikan sengketa kewarisan di Pengadilan Agama Sengkang belum efektif karena adanya faktor penghambat mediator dalam menyelesaikannya antara lain adalah: 1) para pihak atau salah satu pihak tidak hadir untuk mengikuti proses mediasi, 2) tidak ada yang mau mengalah, 3) kualitas mediator.

Implikasi Penelitian ini adalah: 1) dengan adanya proses mediasi yang dilakukan oleh mediator di Pengadilan dikehendaki adanya peningkatan dalam proses penyelesaian perkara utamanya dalam mediasi. Mediator harus berperan dalam melakukan penyelesaian sengketa yang terbaik agar proses mediasi berjalan maksimal, agar para pihak merasa puas dan tidak ada pihak yang dirugikan, 2) penelitian ini diharapkan dapat berdampak pada peningkatan terhadap keberhasilan mediator dalam memediasi pihak yang berperkara di Pengadilan Agama.

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### ***A. Latar Belakang Masalah***

Islam diyakini sebagai agama yang membawa rahmat bagi alam semesta, terutama dalam mewujudkan masyarakat yang ideal. Sehingga islam sangat menganjurkan manusia untuk hidup dengan damai dengan manusia yang ada di sekitar, tidak ada perselisihan antara satu orang dengan orang yang lain, agar tercipta masyarakat yang damai, aman, dan tentram tanpa ada masalah. Mengatur berbagai perikehidupan, diperlukan suatu peraturan yang dibuat, disepakati, dan ditaati oleh manusia atau sekelompok orang. Peraturan-peraturan yang dibuat itu, umumnya dipahami dan diartikan sebagai hukum atau undang-undang.<sup>1</sup> Peraturan- peraturan itu kemudian dituangkan kedalam hukum tertulis yang bersifat mengikat kepada semua lapisan masyarakat.

Di negara kita Indonesia memiliki dua sistem hukum yakni hukum pidana dan hukum perdata, dalam hukum Islam dimensi perdata mengandung hak manusia yang dapat dipertahankan melalui kesepakatan damai antara para pihak yang bersengketa. Kebanyakan sengketa yang terjadi mengambil jalan dengan cara melalui jalur hukum di pengadilan, untuk dimensi hukum perdata Islam maka arahnya ke Pengadilan Agama. Dalam penyelesaian sengketa atau perkara di pengadilan, maka jalan pertama yang di tempuh disana akan ditawarkan sebuah bentuk perdamaian yang dikenal dengan nama mediasi yang dilakukan oleh seorang mediator.

---

<sup>1</sup> Supardin, *Fikih Peradilan Agama Di Indonesia (Rekonsrtuksi Materi Perkara Tertentu)*, (Cet. I; Makassar: Alauddin University Press, 2014), h. 1.



Mediator adalah pihak ketiga yang netral dan tidak memihak yang mempunyai tugas untuk memediasi atau mendamaikan para pihak yang bersengketa dengan cara mempertemukan para pihak yang bersengketa guna mencari penyelesaian secara damai. Dalam proses memediasi para pihak yang bersengketa maka mediator harus bersifat netral dan juga adil (tidak sewenang-wenang, tidak memihak, tidak berat sebelah), adil terutama mengandung arti bahwa suatu keputusan dan tindakan didasarkan atas norma-norma yang objektif, jadi tidak subjektif apalagi sewenang-wenang.<sup>2</sup>

Mediator ini berkewajiban untuk melaksanakan tugas dan fungsinya berdasarkan pada kehendak dan kemauan para pihak. Walau demikian ada suatu pola umum yang dapat diikuti dan pada umumnya dijalankan oleh mediator dalam rangka penyelesaian sengketa para pihak. Sebagai suatu pihak di luar perkara, yang tidak memiliki kewenangan memaksa, mediator ini berkewajiban untuk bertemu dan mempertemukan para pihak yang bersengketa guna mencari masukan mengenai pokok persoalan yang dipersengketakan oleh para pihak. Mediator harus mampu menciptakan suasana dan kondisi yang kondusif bagi terciptanya kompromi di antara kedua belah pihak yang bersengketa untuk memperoleh hasil yang saling menguntungkan (win-win).<sup>3</sup>

---

<sup>2</sup> Muhammad Sadi Is, *Pengantar Ilmu Hukum* (Cet. I; Jakarta: Prenada Media Group, 2015) h. 196.

<sup>3</sup> Gunawan dkk, *Hukum Arbitrase* (Cet. III; Jakarta: Rajawali Pers, 2003), h. 36-37.

Sengketa atau konflik merupakan problema sosial yang langsung bersentuhan dengan hukum dan memerlukan pemecahan secara integral. Terlebih lagi karena manusia sebagai mahluk sosial maka sangat di perlukan cara penyelesaian yang menjunjung tinggi nilai kemanusiaan.<sup>4</sup> Dan salah satu alternatif penyelesaian sengketa dengan melaui lembaga Peradilan Agama bagi orang-orang yang beragama Islam, Peradilan Agama adalah salah satu pelaku kekuasaan kehakiman bagi rakyat pencari keadilan yang beragama Islam mengenai perkara tertentu.<sup>5</sup> Salah satunya adalah menangani perkara kewarisan (Hukum kewarisan adalah hukum yang mengatur tentang pemindahan hak pemilikan harta peninggalan (tirkah) pewaris, menentukan siapa-siapa yang berhak menjadi ahli waris dan berapa bagiannya masing-masing.<sup>6</sup> Oleh karena itu, Islam menyerukan kepada semua ummat manusia untuk hidup dengan damai dan apabila terdapat konflik diantara manusia maka harus segera memperbaiki hubungan (berdamai).

Allah berfirman didalam QS. Al-Hujurat'/49: 10 :

إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ إِخْوَةٌ فَأَصْلَحُوا بَيْنَ أَخَوَيْكُمْ وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ

Terjemahnya :

---

<sup>4</sup> Yuzna Zaidah, *Penyelesaian Sengketa Melalui Peradilan Dan Arbitrase Syari'ah Di Indonesia*, (Cet. II; Yogyakarta: Aswaja Pressindo, 2015), h. 5.

<sup>5</sup> Republik Indonesia, *Undang-undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Peradilan Agama* (Jakarta: Cemerlang, 2008), h. 2.

<sup>6</sup> Republik Indonesia, *Undang-undang Perkawinan Indonesia (Dilengkapi Dengan Kompilasi Hukum Islam Indonesia* (Jakarta: Cemerlang, t.th.) h. 233.

Orang-orang beriman itu Sesungguhnya bersaudara. sebab itu damaikanlah (perbaikilah hubungan) antara kedua saudaramu itu dan takutlah terhadap Allah, supaya kamu mendapat rahmat.<sup>7</sup>

Asbabun nuzulnya yaitu Asy-Syaikhani dari Anas bahwasanya Nabi saw menunggang keledai dan pergi menemui Abdullah bin Ubay. Abdullah kemudian berkata, “Menjauhlah engkau dariku karena engkau menyakitiku disebabkan bau busuk dari keledaimu.” Salah seorang laki-laki dari sahabat Anshar yang tidak terima kemudian berkata, “ Demi Allah, sungguh keledai beliau lebih wangi daripada bau badanmu.” Sedangkan salah seorang laki-laki dari kabilahnya Abdullah menjadi marah sehingga masing-masing bersitegang. Antara kedua kelompok ini kemudian terjadi saling pukul dengan pelepah kurma dan sandal. Maka turunlah ayat berkenaan dengan hal tersebut, *“Dan jika ada dua golongan dari orang-orang mukmin berperang, maka damaikanlah antara keduanya...”*

Sa'id bin Manshur dan Ibnu Jarir meriwayatkan dari Abu Malik, ia mengatakan; Dua orang laki-laki Muslim berdebat dengan sengit sehingga pendukung yang satu marah terhadap pendukung yang lain. Keduanya, saling memukul dengan tangan dan sandal. Allah lalu menurunkan ayat *“Dan jika ada dua golongan...”*

Ibnu Jarir dan Ibnu Abi Hatim meriwayatkan dari As-Suddi, ia mengatakan; Dahulu ada seorang laki-laki yang bernama Imran dan memiliki istri bernama Ummu Zaid. Perempuan ini berniat untuk mengunjungi keluarganya, tetapi suaminya melarangnya dan menahannya. Perempuan ini lalu mengirimkan kabar kepada kaumnya sehingga kabilah dari perempuan itu lalu datang dan

---

<sup>7</sup> Kementerian Agama Republik Indonesia, *Al-Quran dan Terjemahnya*, (Jakarta: Yayasan Penyelenggara Penerjemah Al-Qur'an, 2002), h. 744.

membebaskan perempuan itu untuk membawanya kepada mereka. Suami perempuan itu kemudian keluar rumah dan langsung meminta bantuan kepada kabilahnya sehingga kabilahnya pun berdatangan untuk memisahkan perempuan istrinya itu dari kabilahnya. Kedua kabilah itu kemudian bertikai dan saling melempar sandal. Maka turunlah ayat ini berkenaan dengan hal tersebut, “*Dan jika ada dua golongan dari orang-orang mukmin berperang...*” Mereka kemudian menggambarkan hal ini kepada Rasulullah saw. Beliau lalu mendamaikan mereka dan mereka pun kembali kepada perintah Allah swt.

Ibnu Jarir meriwayatkan dari Al-Hasan, ia mengatakan; Dahulu terjadi pertikaian diantara dua desa. Mereka kemudian mengundang juru damai akan tetapi menolak untuk mengikuti hasil keputusannya. Maka Allah menurunkan ayat, “*Dan jika ada dua golongan dari orang mukmin berperang...*”

Diriwayatkan dari Qatadah ia mengatakan; Disebutkan kepada kami bahwa ayat ini turun berkaitan dengan dua orang laki-laki Ansar yang terjadi persengketaan mengenai hak mereka. Salah seorang diantara mereka berkata, “Sungguh kami akan melakukan jalan kekerasan karena banyaknya kabilah mereka.” Sedangkan yang lain mengajak untuk meminta keputusan kepada Nabi saw. Orang pertama menolak menyebabkan persengketaan terus terjadi hingga mereka saling serang. Masing-masing kemudian memukul dengan tangan dan sandal kepada lawannya, namun tidak terjadi peperangan dengan pedang.<sup>8</sup>

Dan tafsirnya yaitu setelah setelah ayat yang lalu memerintahkan untuk melakukan perdamaian antara kedua kelompok orang beriman, ayat di atas

---

<sup>8</sup> Imam As-Suyuthi, *Asbabun Nuzul Sebab-Sebab Turunnya Ayat AL-QUR'AN* (Cet. I; Jakarta: Dar Al-Fajr lit At-Turats- Kairo, 2014), h. 496-497.

menjelaskan mengapa hal itu perlu dilakukan. Itu perlu dilakukan dan islah perlu ditegakkan karena *sesungguhnya orang-orang mukmin* yang mantap imannya serta dihimpun oleh keimanan, kendati tidak sekerurutan adalah bagaikan *bersaudara* seketurunan, dengan demikian mereka memiliki keterkaitan bersama dalam iman dan juga keterkaitan bagaikan seketurunan; *karena itu* wahai orang-orang beriman yang tidak terlibat langsung dalam pertikaian antar kelompok-kelompok *damaikanlah* walau pertikaian itu hanya terjadi *antara kedua saudara kamu* apalagi jika jumlah yang bertikai lebih lebih dari dua orang *dan bertakwalah kepada Allah* yakni jagalah diri kamu agar tidak ditimpa bencana, baik akibat pertikaian itu maupun selainnya *supaya kamu mendapat rahmat* antara lain rahmat persatuan dan kesatuan.

Kata ( إِنْمَا ) *innama* digunakan untuk membatasi sesuatu. Di sini kaum beriman dibatasi hakikat hubungan mereka dengan *persaaudaraan*. Seakan-akan tidak ada jalinan hubungan antar mereka kecuali persaudaraan itu. Kata *innama* biasa digunakan untuk menggambarkan sesuatu yang telah diterima sebagai suatu hal yang demikian itu adanya dan telah diketahui oleh semua pihak secara baik. Penggunaan kata *innama* dalam konteks penjelasan tentang *persaudaraan antara sesama mukmin* ini, mengisyaratkan bahwa sebenarnya semua pihak telah mengetahui secara pasti bahwa kaum beriman bersaudara, sehingga semestinya tidak terjadi dari pihak manapun hal-hal yang mengganggu persaaudaraan itu.

Kata ( إِخْوَة ) *ikhwah* adalah bentuk jamak dari kata ( أَخ ) *akh*, yang dalam kamus-kamus bahasa sering kali diterjemahkan *saudara* atau *sahabat*. Kata ini pada mulanya berarti *yang sama*. Persamaan dalam garis keturunan

mengakibatkan persaudaraan, demikian juga persamaan dalam sifat atau bentuk apapun. Persamaan kelakuan pemboros dengan setan, menjadikan para pemboros adalah saudara-saudara setan (baca QS. al-Isra [17]: 27). Persamaan dalam kesukuan atau kebangsaan pun mengakibatkan persaudaraan (baca QS. al-A'raf [7]: 65). Ada juga persaudaraan karena persamaan karena kemakhlukan, seperti ketika Nabi Muhammad saw. Menamakan jin adalah saudara-saudara manusia. Beliau melarang menjadikan tulang sebagai alat beristinja' karena itu adalah makanan saudara-saudara kamu dari jenis jin. Demikian sabda beliau.

Kata ( أخ ) *akh* yang berbentuk tunggal itu, biasa juga dijamak dengan kata ( إخوان ) *ikhwan*. Bentuk jamak ini biasanya menunjuk kepada persaudaraan yang tidak sekandung. Berbeda dengan kata ( إخوة ) *ikhwah* yang hanya terulang tujuh kali dalam Al-Qur'an, kesemuanya digunakan untuk menunjuk persaudaraan seketurunan, kecuali ayat al-Hujurat di atas. Hal ini agaknya untuk mengisyaratkan bahwa persaudaraan yang terjalin antara sesama muslim, adalah persaudaraan yang dasarnya berganda. Sekali atas dasar persamaan iman, dan kali kedua adalah persaudaraan seketurunan, walaupun yang kedua ini bukan dalam pengertian hakiki. Dengan demikian tidak ada alasan untuk memutuskan hubungan persaudaraan itu. Ini lebih-lebih lagi jika masih direkat oleh persaudaraan sebangsa, secita-cita, sebahasa, senasib dan sepenanggungan.

Thabataba'I menulis bahwa hendaknya kita menyadari firmanNya: *"Sesungguhnya orang-orang mukmin bersaudara"* merupakan ketetapan syariat berkaitan dengan persaudaraan antara orang-orang mukmin dan yang mengakibatkan dampak keagamaan serta hak-hak yang ditetapkan agama.

Hubungan kekeluargaan antara anak, bapak atau saudara, ada yang ditetapkan agama atau undang-undang serta memiliki dampak-dampak tertentu seperti hak kewarisan, nafkah, keharaman kawin dan lain-lain, dan ada juga yang ditetapkan hanya berdasarkan ketentuan umum (natural) yakni hubungan pertalian keturunan atau rahim. Dua orang anak yang lahir dari dua ibu bapak melalui perkawinan yang sah menurut agama, adalah dua saudara yang diakui oleh agama, sekaligus diakui berdasar ketentuan umum yakni akibat kelahirannya dari ibu dan bapak yang sama. Tetapi jika salah seorang dari kedua anak tadi lahir akibat perzinahan, maka yang ini bukanlah anak sah yang diakui agama walaupun dia adalah anak yang lahir dari sumber sperma yang sama dan rahim ibu yang sama. Anak itu adalah anak hanya berdasar ketentuan umum (natural), bukan ketentuan agama. Demikian juga anak angkat. Boleh jadi sementara peraturan menilainya sebagai anak, tetapi Islam tidak menilainya sebagaimana halnya anak kandung. Nah jika demikian, persaudaran beranekaragam dan memiliki dampak yang bermacam-macam. Ada persaudaraan umum (natural) yang tidak memiliki dampak dalam ajaran agama seperti lahirnya dua orang dari ayah dan ibu yang sama. Ada juga persaudaraan yang memiliki dampak tertentu yang ditetapkan agama, misalnya dampaknya dalam pernikahan dan kewarsan. Atau persaudaraan berdasar persusuan, yang juga memiliki dampaknya pada pernikahan, waku tidak dalam kewarisan. Dengan demikian, persaudaraan antar sesama manusia pun berbeda-beda, walau semua dapat dinamai saudara. Demikian lebih kurang uraian Thabathaba'i.



Kata ( أخويكم ) *akhawaikum* adalah bentuk dual dari kata ( أخ ) *akh*. Penggunaan bentuk dual di sini untuk mengisyaratkan bahwa jangankan banyak orang, dua pun, jika mereka berselisih harus diupayakan *ishlah* antar mereka, sehingga persaudaraan dan hubungan harmonis mereka terjalin kembali.

Ayat di atas mengisyaratkan dengan sangat jelas bahwa persatuan dan kesatuan, serta hubungan harmonis antar anggota masyarakat kecil atau besar, akan melahirkan limpahan rahmat bagi mereka semua. Sebaliknya, perpecahan dan keretakan hubungan mengundang lahirnya bencana buat mereka, yang pada puncaknya dapat melahirkan pertumpahan darah dan perang saudara sebagaimana dipahami dari kata *qital* yang puncaknya adalah peperangan.<sup>9</sup>

Upaya Perdamaian dalam menyelesaikan suatu masalah merupakan hal yang wajib dilakukan oleh setiap pihak yang bersengketa agar tetap menjaga komunikasi dan menata berbagai aspek kehidupan di dunia dengan baik antar sesama manusia.

Secara Umum, Mediasi adalah proses pengikutsertaan pihak ketiga dalam menyelesaikan suatu perselisihan sebagai penasehat.<sup>10</sup> Mediasi secara langsung merupakan suatu kewajiban yang memang harus dilakukan dalam proses persidangan. Hal ini dimaksudkan untuk mempermudah penyelesaian sengketa bagi para pihak yang bersengketa demi memperoleh kesepakatan bersama dan memberikan suatu keadilan bagi kedua belah pihak yang bersengketa, karena

---

<sup>9</sup> M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Misbah Pesan, Kesan dan Keserasian Al-Qur'an* ( Cet VIII; Jakarta: Penerbit Lentera Hati, 2007), h. 247-249.

<sup>10</sup> Tim Penyusun Kamus Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (Jakarta: Balai Pustaka 2000), h. 640.

dengan adanya mediasi maka besar harapan untuk mendamaikan keduanya agar tidak terjadi perselisihan. Mediasi harus diterapkan dan diefektifkan dalam menyelesaikan sengketa yang terjadi di pengadilan, karena mediasi sangat berperan penting dalam menyelesaikan sengketa-sengketa yang terjadi seperti penyelesaian sengketa kewarisan.

Hukum waris adalah hukum yang mengatur tentang peralihan harta kekayaan yang ditinggalkan seseorang yang meninggal serta akibatnya bagi para ahli warisnya. Pada dasarnya hanya hak-hak dan kewajiban-kewajiban dalam lapangan hukum kekayaan/harta benda saja yang dapat diwaris.<sup>11</sup>

Sengketa kewarisan bukanlah hal yang mudah untuk di selesaikan karena pembagian-pembagian kewarisan harus bersumber dari Al-Qur'an, Hadis, dan juga Ijma, maka dalam proses penyelesaian sengketa kewarisan sangatlah rumit. Sehingga pada proses penyelesaiannya dibutuhkan pengetahuan tentang kewarisan secara mendalam, agar tidak terjadi kesalahan dalam pembagiannya.

Mediasi dapat memberikan akses yang lebih besar kepada para pihak menemukan penyelesaian yang memuaskan dan memenuhi rasa keadilan. Dengan pengintegrasian mediasi ke dalam proses beracara di Pengadilan dapat menjadi salah satu instrumen efektif mengatasi masalah penumpukan perkara di pengadilan serta memperkuat dan memaksimalkan fungsi lembaga peradilan dalam penyelesaian sengketa.

---

<sup>11</sup> Effendi Perangin, *Hukum Waris* (Jakarta: Rajawali Pers, 2008), h. 3.

Namun saat ini kepercayaan masyarakat terhadap dunia peradilan semakin berkurang. Hal itu didasarkan pada banyaknya kritik yang ditujukan pada lembaga peradilan. Dimana lembaga-lembaga peradilan dinilai sebagai lembaga yang lamban dan berbelit-belit dalam menyelesaikan sengketa di pengadilan. Kritik tersebut memang ada benarnya meskipun tidak sepenuhnya benar, karena proses bersengketa di pengadilan harus mengikuti hukum acara, sehingga membutuhkan waktu. Apalagi dalam khazanah hukum acara perdata dikenal dua jenis upaya hukum, yakni upaya hukum biasa dan upaya hukum istimewa/luar biasa,<sup>12</sup> yang lebih menyita banyak tenaga, waktu, dan biaya kalau pihak yang kalah tidak merasa puas dengan putusan hakim. Oleh karena itu perlu dicarikan alternatif penyelesaian sengketa di pengadilan yang efisien dan efektif serta para pihak sama-sama merasa menang, tidak ada pihak yang merasa dikalahkan. Dengan adanya mediasi yang dilakukan oleh mediator maka kemungkinan besar mampu mendamaikan pihak yang bersengketa agar tidak melanjutkan lagi perkaranya apabila mediasinya berhasil.

Berdasarkan uraian dan latar belakang, perlu penelitian dan pengkajian lebih mendalam tentang “Peranan Mediator Dalam Penyelesaian Sengketa Kewarisan Pada Pengadilan Agama Sengkang Kelas I B”.

## ***B. Fokus Penelitian dan Deskripsi Fokus***

### **1. Fokus Penelitian**

---

<sup>12</sup> Abdul Manaf, *Putusan Peninjauan Kembali Dalam Perkara Perceraian Dan Kewarisan* (Cet.I; Bandung: Mandar Maju, 2013), h. 1.

Penelitian ini dilaksanakan di Pengadilan Agama Sengkang Kelas I B, Kabupaten Wajo. Dimana fokus penelitian ini berfokus pada peranan mediator dalam penyelesaian sengketa kewarisan pada Pengadilan Agama Sengkang Kelas I B.

## 2. Deskripsi Fokus

Untuk memperoleh gambaran tentang judul dalam penulisan ini, maka penulis akan memberikan pengertian dan beberapa kata yang terdapat pada judul tersebut yakni:

**Peranan** dalam kamus lengkap bahasa Indonesia adalah sesuatu yang jadi bagian atau yang memegang pemimpin yang terutama dalam terjadinya hal atau peristiwa.<sup>13</sup> Sedangkan yang dimaksud penulis adalah sesuatu yang dilakukan oleh seseorang untuk mencapai suatu tujuan yang baik.

**Mediator** dalam kamus hukum lengkap adalah pihak netral yang membantu para pihak dalam proses perundingan guna mencari berbagai kemungkinan penyelesaian sengketa tanpa menggunakan cara memutus atau memksakan sebuah penyelesaian.<sup>14</sup> Sedangkan yang dimaksud penulis adalah perantara (penghubung, penengah), yang bertindak sebagai penengah bagi pihak yang bersengketa.

**Penyelesaian** dalam kamus lengkap bahasa Indonesia berasal dari kata selesai adalah sudah jadi apa yang di buat.<sup>15</sup> Sedangkan yang dimaksud penulis

---

<sup>13</sup> Desy Anwar, *Kamus Lengkap Bahasa Indonesia* (Surabaya: Amelia, 2003), h. 320.

<sup>14</sup> Rocky Marbun dkk, *Kamus Hukum Lengkap* (Jakarta: Visimedia, 2012), h. 189.

<sup>15</sup> Desy Anwar, *Kamus Lengkap Bahasa Indonesia*, h. 419.

adalah mengakhiri sesuatu yang berkaitan dengan putus atau berakhirnya perkara dengan damai.

**Sengketa** adalah keadaan dimana konflik tersebut dinyatakan di muka umum atau dengan melibatkan pihak ketiga. Ini berarti sengketa merupakan kelanjutan dari konflik, yang mana sebuah konflik akan berubah menjadi sengketa apabila tidak terselesaikan.<sup>16</sup>

**Kewarisan** adalah peralihan hak dan atau kewajiban atas harta kekayaan seseorang setelah ia meninggal dunia kepada ahli warisnya.<sup>17</sup> Dalam istilah hukum yang baku digunakan kata kewarisan, dengan mengambil kata asa “waris ” dengan tambahan awal “ke” dan akhiran “an”. Kata “waris” ini sendiri dapat berarti pula proses. Dalam arti pertama mengandung arti “hal ihwal peralihan harta dari yang mati kepada yang masih hidup”. Arti yang terakhir ini yang digunakan dalam istilah hukum.<sup>18</sup>

**Pengadilan Agama** adalah tempat atau badan yang melakukan proses pemeriksaan sampai penyelesaian segketa bagi orang-orang yang beragama islam.

**Sengkang** merupakan nama ibukota kabupaten Wajo, dan di Sengkang inilah terdapat Pengadilan Agama Kelas I B yang akan menjadi lokasi dari penelitian ini.

### **C. Rumusan Masalah**

---

<sup>16</sup> Yusna Zaidah, *Penyelesaian Sengketa Melalui Peradilan Dan Arbitrase Syari'ah Di Indonesia*, h. 3.

<sup>17</sup> Mohammad Daud Ali, *Hukum Islam* (Jakarta: Rajawali Pers, 1991), h. 313.

<sup>18</sup> Amir Syarifuddin, *Hukum Kewarisan Islam* (Cet. V; Jakarta: Prenada Media Group 2015), h. 6

Adapun yang menjadi perhatian bagi peneliti dalam hal ini sebagaimana pokok masalah yakni “ Bagaimana Peranan Mediator Dalam Penyelesaian Sengketa Kewarisan Pada Pengadilan Agama Sengkang Kelas I B”. Dari pokok masalah lahirlah sub-sub masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana proses yang dilakukan oleh mediator dalam menyelesaikan sengketa kewarisan di Pengadilan Agama Sengkang Kelas I B?
2. Bagaimana efektivitas yang dicapai mediator dalam menyelesaikan sengketa kewarisan pada Pengadilan Agama Kelas Sengkang I B?

#### ***D. Kajian Pustaka***

1. Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi Di Pengadilan. Perma ini sangat membantu penulis dalam memahami dan mengetahui mengenai prosedur mediasi di pengadilan dan juga mengetahui tentang mediator. Adapun perbedaannya dengan penelitian ini adalah penelitian akan membahas mengenai peranan mediator dalam penyelesaian sengketa kewarisan, sedangkan PERMA ini hanya membahas mengenai Prosedur Mediasi di Pengadilan.
2. Dra. Hj. Yusna Zaidah, M.H, dalam bukunya “Penyelesaian Sengketa Melalui Peradilan Dan Arbitrase Syari’ah Di Indonesia” Tahun 2015. Dimana dalam buku ini menjelaskan tentang sengketa dan cara penyelesaiannya dalam sistem hukum di Indonesia. Adapun perbedaannya dengan penelitian ini yaitu dalam buku ini kebanyakan membahas mengenai arbitrase namun dalam penelitian ini akan membahas mengenai mediasi dan juga mediator.

3. Gunawan Widjaja & Ahmad Yani, Hukum Arbitrase Tahun 2003. Dimana dalam buku ini menjelaskan tentang Pranata alternatif penyelesaian sengketa. Adapun perbedaannya dengan penelitian ini yaitu dalam buku ini hanya membahas mengenai hukum arbitrase namun dalam penelitian ini akan membahas mengenai mediasi dan juga mediator.
4. Prof. Dr.Amir Syarifuddin, dalam bukunya yang berjudul “Hukum Kewarisan Islam” Tahun 2015. Dimana dalam buku ini menjelaskan tentang dasar dan sumber hukum kewarisan Islam. Adapun perbedaannya dengan penelitian ini adalah dalam buku ini hanya membahas mengenai kewarisan Islam namun dalam penelitian membahas mengenai peranan mediator dalam menyelesaikan sengketa kewarisan.
5. Dr. Abdillah Mustari, Hukum Waris (Perbandingan Hukum Islam Dan Undang-undang Hukum Perdata Barat (Burgerlijk Wetboek)) Tahun 2014. Dalam buku ini menjelaskan tentang Pengertian hukum waris, Sumber-sumber hukum waris Islam.
6. Abdul Ghofur Anshari, Hukum Kewarisan Islam Di Indonesia (Eksistensi Dan Adaptasi Tahun 2012. Dalam buku ini membahas tentang Asas-asas hukum kewarisan Islam.
7. Prof. Dr. H. Zanuiddin Ali, M.A, Hukum Perdata Islam Di Indonesia Tahun 2006. Buku ini membahas tentang Unsur-unsur hukum kewarisan Islam.

Dari beberapa referensi yang telah disebutkan diatas, dalam pembahasannya belum ada pembahasan yang menjelaskan secara detail dan



lengkap tentang peranan mediator dalam penyelesaian sengketa kewarisan. Akan tetapi dari beberapa referensi diatas terdapat beberapa persamaan yang menjadi inspirasi penulis untuk membahas dan tetap mengacu pada pokok permasalahan yang terdapat dalam buku tersebut, dan disamping itu juga, belum ada penulis dan peneliti lain yang membahas tentang judul ini.

#### ***E. Tujuan dan kegunaan penelitian***

Adapun tujuan penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui bagaimana proses yang dilakukan oleh mediator dalam menyelesaikan sengketa kewarisan di Pengadilan Agama Sengkang Kelas I B.
2. Untuk mengetahui bagaimana efektivitas yang dicapai mediator dalam menyelesaikan sengketa kewarisan pada Pengadilan Agama Sengkang Kelas I B.
3. Untuk mengetahui bagaimana peranan mediator dalam penyelesaian sengketa kewarisan pada Pengadilan Agama Sengkang Kelas I B.

Adapun kegunaan penelitian ini adalah:

1. Kegunaan ilmiah

Penelitian ini diharapkan menjadi informasi dan pembelajaran kepada masyarakat luas mengenai peranan mediator dalam menyelesaikan sengketa kewarisan pada Pengadilan Agama Sengkang Kelas I B.

2. Kegunaan praktis

Penelitian ini diharapkan mampu untuk memberikan suatu gambaran tentang upaya mediator dalam penyelesaian sengketa Kewarisan pada Pengadilan Agama Sengkang Kelas I B. Penelitian ini juga diharapkan dapat

menjadi wacana bagi masyarakat maupun mahasiswa/i serta pegawai Pengadilan Agama Sengkang seperti Hakim, Panitera, dan semua pihak yang bersangkutan khususnya kepada mediator.



## BAB II

### TINJAUAN TEORETIS

#### *A. Mediator dalam Lembaga Peradilan Agama*

##### *1. Pengertian Mediasi dan Mediator*

Kata “mediasi” berasal dari bahasa Inggris, “mediation” yang artinya penyelesaian sengketa yang melibatkan pihak ketiga sebagai penengah atau penyelesaian secara menengahi, yang menengahinya dinamakan mediator atau orang yang menjadi penengah.<sup>1</sup>

Secara umum, dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, disebutkan bahwa yang dimaksud dengan mediasi adalah hal melibatkan pihak ketiga sebagai penengah seperti dalam proses penyelesaian suatu sengketa atau perselisihan penengahan.<sup>2</sup>

Mediasi adalah upaya penyelesaian sengketa yang dilakukan oleh para pihak melalui perundingan dengan bantuan pihak lain atau pihak ketiga yang netral (mediator) guna mencari dan menemukan bentuk-bentuk penyelesaian yang dapat disepakati bersama oleh para pihak.<sup>3</sup>

Sebagaimana firman Allah dalam QS. An-Nisaa’/4: 114:

---

<sup>1</sup> Jhon Echols dan Hasan Shadily, *Kamus Inggris Indonesia* (Cet. XXV; Jakarta: Gramedia Pustaka Umum, 2003), h. 377.

<sup>2</sup> Tim Pustaka Phoenix, *Kamus Besar Bahasa Indonesia (Edisi Baru)* (Cet. VI; Jakarta: Media Pustaka Phoenix, 2012), h. 571.

<sup>3</sup> Yusna Zaidah, *Penyelesaian Sengketa Melalui Peradilan Dan Arbitrase Syari’ah Di Indonesia*, h. 28.

لَا خَيْرَ فِي كَثِيرٍ مِّن نَّجْوَاهُمْ إِلَّا مَنْ أَمَرَ بِصَدَقَةٍ أَوْ مَعْرُوفٍ أَوْ إِصْلَاحٍ  
 بَيْنَ النَّاسِ ۚ وَمَن يَفْعَلْ ذَلِكَ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ فَسَوْفَ نُؤْتِيهِ  
 أَجْرًا عَظِيمًا ﴿١١٤﴾

Terjemahnya:

Tidak ada kebaikan pada kebanyakan bisikan-bisikan mereka, kecuali bisikan-bisikan dari orang yang menyuruh (manusia) memberi sedekah, atau berbuat ma'ruf, atau Mengadakan perdamaian di antara manusia. dan Barangsiapa yang berbuat demikian karena mencari keridhaan Allah, Maka kelak Kami memberi kepadanya pahala yang besar.<sup>4</sup>

Adapun pengertian mediasi menurut PERMA RI No. 1 Tahun 2016 tentang prosedur mediasi di pengadilan pasal 1 butir 1 menyatakan bahwa “mediasi adalah cara penyelesaian sengketa melalui proses perundingan untuk memperoleh kesepakatan para pihak dengan dibantu oleh mediator.”<sup>5</sup>

Pengertian mediator sendiri adalah pihak ketiga yang dilibatkan dalam proses mediasi baik perorangan maupun dalam bentuk lembaga independen yang bersifat netral yang tidak memihak.<sup>6</sup> Sedangkan dalam perma no.1 tahun 2016 pasal 1 butir 2 mediator adalah hakim atau pihak lain yang memiliki sertifikat mediator sebagai pihak netral yang membantu para pihak dalam proses perundingan guna mencari berbagai kemungkinan penyelesaian sengketa tanpa menggunakan cara memutus atau memaksakan sebuah penyelesaian.<sup>7</sup>

<sup>4</sup> Kementerian Agama Republik Indonesia, *Mushaf Al-Qur'an Terjemah*, (Jakarta: Al-Huda Kelompok Gema Insani, 2002) h. 98.

<sup>5</sup> PERMA No. 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi Di Pengadilan.

<sup>6</sup> Yusna Zaidah, *Penyelesaian Sengketa Melalui Peradilan Dan Arbitrase Syari'ah Di Indonesia*, h. 29.

<sup>7</sup> PERMA No. 1 Tahun 2016.

Jadi dapat dipahami bahwa mediasi merupakan salah satu proses pelaksanaan perdamaian dengan kesepakatan para pihak yang bersengketa melalui bantuan pihak ketiga (mediator). Dan mediator merupakan pihak ketiga dalam membantu mendamaikan kedua belah pihak yang bersengketa.

## ***2. Dasar Hukum Mediasi dan Mediator***

Mediasi sebagai sebuah cara penyelesaian sengketa memiliki dasar hukum sebagai berikut:

1. Pancasila dan UUD 1945, disiratkan dalam filosofinya bahwa asas penyelesaian sengketa adalah musyawarah dan mufakat.
2. HIR Pasal 130 (HIR=Pasal 154 RBg=Pasal Rv).
3. Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor. 1 Tahun 2002 tentang Pemberdayaan Pengadilan Tingkat Pertama Menerapkan Lembaga Damai.
4. Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor.02 Tahun 2003 tentang Prosedur Mediasi Di Pengadilan.
5. Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor.01 Tahun 2008 Tentang Prosedur Mediasi Di Pengadilan
6. Mediasi atau APS Di Luar Pengadilan diatur dalam pasal 6 UU Nomor.30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa.
7. Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor. 01 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi Di Pengadilan.

## ***3. Fungsi dan Tujuan Mediator***

Fungsi mediator adalah sebagai penengah dan ia harus netral. Karena jika ia mediator bersikap netral, maka akan lahir ikatan berdasarkan kepercayaan.

Mediator ini berkewajiban untuk melaksanakan tugas dan fungsinya berdasarkan kehendak dan kemauan para pihak. Mediator juga harus mampu menciptakan situasi dan kondisi yang kondusif bagi terciptanya kompromi diantara kedua belah pihak yang bersengketa untuk memperoleh hasil yang saling menguntungkan (win-win). Selain itu mediator juga bertujuan menolong dua belah pihak untuk mencapai kesepakatan dengan tetap netral dan menjamin kerahasiaan para pihak tidak merasa kehilangan, walaupun harus mengurangi hal yang menguntungkan mereka untuk mencapai kesepakatan.<sup>8</sup>

#### **4. Kewajiban Mediator**

1. Mediator wajib menyelenggarakan proses mediasi sesuai dengan prinsip penentuan diri sendiri oleh para pihak.
2. Mediator wajib memberitahu para pihak pada pertemuan lengkap pertama bahwa semua bentuk penyelesaian atau keputusan yang diambil dalam proses mediasi memerlukan persetujuan para pihak.
3. Mediator wajib menjelaskan kepada para pihak pada pertemuan lengkap pertama tentang pengertian dan prosedur mediasi, pengertian kaukus dalam proses mediasi, serta peran mediator.
4. Mediator wajib menghormati hak para pihak, antara lain hak untuk konsultasi dengan penasihat hukumnya atau para ahli dan hak untuk keluar dari proses mediasi.

---

<sup>8</sup> Yusna Zaidah, *Penyelesaian Sengketa Melalui Peradilan Dan Arbitrase Syariah Di Indonesia*, h.28- 29.

5. Mediator wajib menghindari penggunaan ancaman, tekanan, atau intimidasi dan paksaan terhadap salah satu atau kedua belah pihak untuk membuat suatu keputusan.
6. Mediator wajib menjaga kerahasiaan informasi yang terungkap di dalam proses mediasi.
7. Mediator wajib memusnahkan catatan-catatan dalam proses mediasi setelah berakhirnya proses mediasi.

#### 5. *Peranan Mediator*

Peran penting seorang mediator dapat digambarkan sebagai berikut:

1. Mediator harus berada di tengah para pihak, mediator bertindak sebagai pihak ketiga yang menempatkan diri benar-benar di tengah para pihak.
2. Mengisolasi proses mediasi. Mediator tidak berperan sebagai hakim yang bertindak menentukan pihak mana yang salah dan benar, bukan pula bertindak dan berperan sebagai pemberi nasihat hukum (*to give legal advice*), juga tidak mengambil peran sebagai penasihat hukum (*counsellor*) atau mengobati (*the rapits*) melainkan hanya berperan sebagai penolong (*helper flore*).
3. Mediator harus mampu menekan reaksi, dalam point ini seorang mediator harus mampu berperan untuk menghargai apa saja yang dikemukakan kedua belah pihak, ia harus menjadi seorang pendengar yang baik mampu mengontrol kesan buruk sangka, mampu berbicara dengan terang dengan bahasa yang netral, mampu menganalisa dengan cermat fakta persoalan yang kompleks serta mampu berpikir di atas pendapat sendiri.



4. Mampu mengarahkan pertemuan pemeriksaan, sedapat mungkin pembicaraan pertemuan tidak melentur dan menyinggung serta mampu mengarahkan secara langsung kearah pembicaraan ke arah pokok penyelesaian.
5. Pemeriksaan bersifat konfidensi, segala sesuatu yang dibicarakan dan dikemukakan oleh para pihak harus dianggap sebagai informasi rahasia (*confidential information*), oleh karena itu mediator harus memegang teguh kerahasiaan persengketaan maupun identitas pihak-pihak yang bersengketa.
6. Hasil kesepakatan dirumuskan dalam bentuk kompromis (*compromise solution*), kedua belah pihak tidak ada yang kalah dan tidak ada yang menang, tetapi sama-sama menang (*win-win*).<sup>9</sup>

## **B. Kewarisan Dalam Islam**

### **1. Pengetian dan Dasar Hukum Kewarisan Islam**

Hukum waris Islam dikenal dengan ilmu faraid yang terambil dari kata فرائض (faridhah) adalah jamak dari kata فريضة diambil dari kata فرض yang artinya ketentuan atau ketetapan. Pengertian ini terambil dari QS. An-Nisa'/4: 11:

.... ءَابَاؤُكُمْ وَأَبْنَاؤُكُمْ لَا تَدْرُونَ أَيُّهُمْ أَقْرَبُ لَكُمْ نَفَعًا فَرِيضَةٌ مِّنَ  
 ٱللَّهِ ....

Terjemahnya :

---

<sup>9</sup> Restiana, "Penyelesaian Sengketa Tanah Warisan Melalui Mediasi (Studi Kasus Di Pengadilan Agama Watampone Kelas 1B)", *Skripsi* (Makassar: Fak. Syariah dan Hukum UIN Alauddin, 2016), h. 20-21.

Tentang orang tuamu dan anak-anakmu, kamu tidak mengetahui siapa di antara mereka yang lebih dekat (banyak) manfaatnya bagimu. ini adalah ketetapan dari Allah.<sup>10</sup>

Dari segi bahasa, فرائض berarti beberapa bagian tertentu. Dengan demikian ilmu faraidh adalah suatu ilmu yang menjelaskan tentang bagian-bagian tertentu yang telah ditetapkan oleh syara' yakni Al-Qur'an dan Hadis.<sup>11</sup>

Adapun istilah ilmu mawaris atau ilmu faraidh menurut fuqaha adalah sebagai berikut:

علم يعرف به ومن لا يرث ومقدار كل وارث وكيفية التوزيع

Artinya:

Suatu ilmu yang dengannya dapat kita ketahui siapa yang dapat menerima dan yang tidak dapat menerima pusaka, dan kadar/bagian yang diterima oleh tiap-tiap ahli waris dan metode pembagiannya.<sup>12</sup>

Adapun penggunaan kata mawarist lebih melihat kepada yang menjadi objek dari hukum ini, yaitu harta yang beralih kepada ahli waris yang masih hidup. Sebab, kata mawarist merupakan bentuk plural dari kata miwrats yang berarti mauruts, harta yang diwarisi. Dengan demikian, maka arti kata warits yang digunakan dalam beberapa kitab merujuk kepada orang yang menerima harta warisan itu, karena kata waritst artinya yang menerima warisan.<sup>13</sup>

Dalam Al-qur'an pun ditemukan pengertian mirast sebagai perpindahan atau saling memberi dan menerima, istilah ini dikenal para ulama ialah

<sup>10</sup> Kementrian Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an Dan Terjemahnya*, h. 102.

<sup>11</sup> Abdilllah Mustari, *Hukum Waris (Perbandingan Hukum Islam Dan Undang-undang Hukum Perdata Barat (Burgerlijk Wetboek))* (Cet. I; Makassar: Alauddin University Press, 2014), h. 1.

<sup>12</sup> Abdilllah Mustari, *Hukum Waris (Perbandingan Hukum Islam Dan Undang-Undang Hukum Perdata (Burgerlijk Wetboek))*, h. 1-2.

<sup>13</sup> Amir Syarifuddin, *Hukum Kewarisan Islam*, h. 6.

berpindahnya hak kepemilikan dari orang yang sudah meninggal kepada ahli warisnya yang masih hidup, baik yang ditinggalkan itu berupa harta (uang), tanah atau apa saja yang berupa hak milik legal secara syar'i.<sup>14</sup> Sebagaimana firman Allah dalam QS. an-Naml/27: 16:

وَوَرِثَ سُلَيْمَانُ دَاوُودَ ۖ وَقَالَ يَا أَيُّهَا النَّاسُ عَلِمْنَا مِنْطِقَ الطَّيْرِ وَأُوتِينَا مِنْ كُلِّ شَيْءٍ ۚ إِنَّ هَذَا لَهُوَ الْفَضْلُ الْمُبِينُ ﴿١٦﴾

Terjemahnya:

Dan Sulaiman telah mewarisi Daud, dan dia berkata: "Hai manusia, Kami telah diberi pengertian tentang suara burung dan kami diberi segala sesuatu. Sesungguhnya (semua) ini benar-benar suatu kurnia yang nyata".<sup>15</sup>

Demikian pula Firman Allah dalam QS. al-Ahzab/33: 27:

وَأَوْرَثَكُم أَرْضَهُمْ وَدِيَارَهُمْ وَأَمْوَالَهُمْ وَأَرْضًا لَمْ تَطُوهَا ۚ وَكَانَ اللَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرًا ﴿٢٧﴾

Terjemahnya:

Dan dia mewariskan kepada kamu tanah-tanah, rumah-rumah dan harta benda mereka, dan (begitu pula) tanah yang belum kamu injak. Dan adalah Allah Maha Kuasa terhadap segala sesuatu.<sup>16</sup>

Dalam terminologi fiqh biasanya dikemukakan pengertian kebahasaan. Hal ini karena kata-kata warasa asal kata kewarisan digunakan dalam Al-Qur'an. Karena memang Al-Qur'anlah dan dirinci dalam Rasulullah, hukum kewarisan islam dibangun. Secara *bahasa*, kata warasa memiliki beberapa arti; *pertama*,

<sup>14</sup> Abdillah Mustari, *Hukum waris (Perbandingan Hukum Islam Dan Undang-undang Hukum Perdata (Burgerlijk Wetboek))*, h. 3

<sup>15</sup> Kementerian Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, h. 532.

<sup>16</sup> Kementerian Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, h. 596.

*mengganti* ( Qs. al-Naml, 27:16), artinya Sulaiman menggantikan kenabian dan kerajaan Daud, serta mewarisi ilmu pengetahuannya. *Kedua*, memberi (Qs. al-Zumar, 39:74) dan *Ketiga*, mewarisi (Qs. Maryam, 19:6). Sedangkan pengertian terminologi, hukum kewarisan adalah hukum yang mengatur pembagian warisan, mengetahui bagian-bagian yang diterima dari harta peninggalan itu untuk setiap yang berhak.<sup>17</sup> Dan hukum kewarisan menurut kompilasi hukum islam adalah hukum yang mengatur tentang pemindahan hak pemilikan harta peninggalan (tirkah) pewaris, menentukan siapa-siapa yang berhak menjadi ahli waris dan berapa bagiannya masing-masing.<sup>18</sup>

Vollmar berpendapat bahwa hukum waris adalah perpindahan dari sebuah harta kekayaan seutuhnya, jadi keseluruhan hak-hak dan wajib-wajib, dari orang-orang yang mewariskan kepada warisnya (Vollmar, 1989: 373). Pendapat ini hanya difokuskan kepada pemindahan harta kekayaan dari pewaris kepada ahli warisnya. Pendapat lainnya dikemukakan oleh Pitlo, ia berpendapat bahwa hukum waris adalah kumpulan peraturan, yang mengatur hukum mengenai kekayaan karena wafatnya seseorang, yang mengenai pemindahan kekayaan yang ditinggalkan oleh simati dan akibat dari pemindahan ini bagi orang-orang yang memperolehnya, baik dalam hubungan antara mereka dengan mereka, maupun dalam hubungan antara mereka dengan pihak ketiga (Pitlo 1986: 1). Pendapat Pitlo ini agak luas, karena didalam pemindahan kekayaan itu, tidak hanya hubungan antara ahli waris yang satu dengan ahli waris lainnya, namun juga

---

<sup>17</sup> Ahmad Rofiq, *Hukum Islam Di Indonesia* (Cet. III; Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1998), h. 355.

<sup>18</sup> Republik Indonesia, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan & Kompilasi Hukum Islam (Cet. I; t.t. Grahamedia Press, 2014), h. 382.

diatur tentang hubungan antara ahli waris dengan pihak ketiga. Hubungan dengan pihak ketiga ini berkaitan dengan masalah-masalah utang piutang pewaris pada saat masih hidup.<sup>19</sup>

Adapun pengertian hukum waris dalam KUHPdata adalah hukum-hukum atau peraturan-peraturan yang mengatur, tentang apakah dan bagaimanakah pembagian hak-hak dan kewajiban tentang kekayaan seseorang pada waktu ia meninggal dunia akan beralih kepada orang lain yang masih hidup. Pada dasarnya, hukum waris adalah hukum yang mengatur tentang peralihan harta kekayaan yang ditinggalkan seseorang yang meninggal serta akibatnya bagi para ahli warisnya. Istilah waris sudah sangat dikenal oleh masyarakat Indonesia, sehingga kebanyakan masyarakat Indonesia mengartikan ilmu waris sebagai suatu perpindahan hak dan kewajiban serta harta kekayaan seseorang yang meninggal dunia kepada orang lain yang masih hidup.<sup>20</sup> Bidang kewarisan yang merupakan kompetensi absolut peradilan agama adalah penentuan siapa yang menjadi ahli waris, penentuan mengenai harta peninggalan, penentuan bagian masing-masing ahli waris, dan melaksanakan pembagian harta peninggalan tersebut, serta penetapan pengadilan atas permohonan seseorang tentang penentuan siapa yang menjadi ahli waris, dan penentuan bagian masing-masing ahli waris.<sup>21</sup>

Dalam konteks Indonesia, umat islam masih banyak dituntut untuk melakukan kerja keras untuk menghasilkan sistem hukum kewarisan yang meng-

---

<sup>19</sup> Salim HS, *Pengantar Hukum Perdata Tertulis (BW)* (Jakarta: Sinar Grafika, 2001), h. 137-138.

<sup>20</sup> Abdillah Mustari, *Hukum waris (Perbandingan Hukum Islam Dan Undang-undang Hukum Perdata Barat (Burgerlijk Wetboek))*, h. 3-4.

<sup>21</sup> Abd. Halim Talli, *Peradilan Indonesia (Berketuhanan Yang Maha Esa)* (Cet. I; Makassar: Alauddin University Press, 2013) h. 86.

Indonesia dengan syariat sebagai acuan utamanya. Upaya keras ke depan itu minimal dapat difokuskan pada dua aspek. *Pertama*, upaya menghasilkan produk hukum kewarisan (yang islami) nasional yang sesuai dengan konteks masyarakat Indonesia. *Kedua*, upaya sosialisasi produk hukum kewarisan nasional tersebut kepada masyarakat Islam.<sup>22</sup>

## **2. Sumber-Sumber Hukum Kewarisan Islam**

Kewarisan islam sebagai bagian dari syari'at islam dan lebih khusus lagi sebagai bagian dari aspek muamalah subhukum perdata (Endang Syaifuddin Anshari, 1400: 71) tidak dapat dipisahkan dengan aspek-aspek lain dari ajaran islam. Karena itu, penyusunan kaidah-kaidahnya harus didasarkan pada sumber yang sama seperti halnya aspek-aspek yang lain dari ajaran islam tersebut.<sup>23</sup>

Dasar hukum kewarisan islam di Indonesia adalah Al-Qur'an , hadis Rasulullah, Perundang-undangan, Kompilasi Hukum Islam, Pendapat para sahabat Rasulullah, dan Pendapat ahli hukum islam melalui ijtihadnya.<sup>24</sup> Penggunaan sumber ini didasarkan kepada ayat Al-Qur'an sendiri dan hadis Nabi. Salah satu ayat yang menyinggung tentang hal ini adalah Allah berfirman dalam QS An-Nisaa/4: 59.

---

<sup>22</sup> Abdul Ghofur Anshori, *Hukum Kewarisan Islam Di Indonesia (Eksistensi dan Adaptasi)* (Cet. I; Yogyakarta: Gadjah Mada University 2012), h. 4

<sup>23</sup> Abdul Ghofur Anshori, *Hukum Kewarisan Islam Di Indonesia (Eksistensi Dan Adaptasi)* h. 6.

<sup>24</sup> Zinuddin Ali, *Hukum Perdata Islam Di Indonesia* (Cet. I; Jakarta: Sinar Grafika, 2006), h. 103.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِيَ الْأَمْرِ مِنْكُمْ  
فَإِنْ تَنَزَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ  
وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ۚ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا ﴿٥١﴾

Terjemahnya :

Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul (Nya), dan ulil amri di antara kamu. kemudian jika kamu berlainan pendapat tentang sesuatu, Maka kembalikanlah ia kepada Allah (Al-Qur'an) dan Rasul (sunnahnya), jika kamu benar-benar beriman kepada Allah dan hari kemudian. yang demikian itu lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya.<sup>25</sup>

Ayat ini memberi pengertian bahwa orang mukmin diharuskan untuk mengikuti atau taat kepada Allah, Rasul dan ulil amri. Hal ini dapat diberi pengertian, bahwa seorang mukmin senantiasa dalam memecahkan berbagai aspek harus mengikuti, dan didasarkan pada sumber tersebut.

Adapun ayat-ayat Al-Qur'an yang mengatur hukum kewarisan islam adalah sebagai berikut:

1. Allah berfirman dalam QS. An.Nisa/4: 7.

لِّلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِّمَّا  
تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ مِمَّا قَلَّ مِنْهُ أَوْ كَثُرَ ۚ نَصِيبًا مَّفْرُوضًا ﴿٧﴾

Terjemahnya:

Bagi orang laki-laki ada hak bagian dari harta peninggalan ibu-bapa dan kerabatnya, dan bagi orang wanita ada hak bagian (pula) dari harta

<sup>25</sup> Kementerian Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an Dan Terjemahnya*, h. 114.

peninggalan ibu-bapa dan kerabatnya, baik sedikit atau banyak menurut bahagian yang telah ditetapkan.<sup>26</sup>

2. Allah berfirman dalam QS. An-Nisa/4 :11.

يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنثِيَيْنِ ۚ فَإِنْ كُنَّ نِسَاءً فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ ۚ وَإِنْ كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ ۚ وَلِأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا الشُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِنْ كَانَ لَهُ وَلَدٌ ۚ فَإِنْ لَّمْ يَكُنْ لَهُ وَلَدٌ وَوَرِثَهُ أَبَوَاهُ فَلِأُمِّهِ الثُّلُثُ ۚ فَإِنْ كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ فَلِأُمِّهِ الشُّدُسُ ۚ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِي بِهَا أَوْ دَيْنٍ ۚ وَأَبَاؤُكُمْ وَأَبْنَاؤُكُمْ لَا تَدْرُونَ أَيُّهُمْ أَقْرَبُ لَكُمْ نَفَعًا ۚ فَرِيضَةٌ مِّنَ اللَّهِ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا ﴿١١﴾

Terjemahnya :

Allah mensyari'atkan bagimu tentang (pembagian pusaka untuk) anak-anakmu. Yaitu : bahagian seorang anak lelaki sama dengan bahagian dua orang anak perempuan dan jika anak itu semuanya perempuan lebih dari dua, Maka bagi mereka dua pertiga dari harta yang ditinggalkan, jika anak perempuan itu seorang saja, Maka ia memperoleh separuh harta. dan untuk dua orang ibu-bapa, bagi masing-masingnya seperenam dari harta yang ditinggalkan, jika yang meninggal itu mempunyai anak, jika orang yang meninggal tidak mempunyai anak dan ia diwarisi oleh ibu-bapanya (saja), Maka ibunya mendapat sepertiga, jika yang meninggal itu mempunyai beberapa saudara, Maka ibunya mendapat seperenam. (Pembagian-pembagian tersebut di atas) sesudah dipenuhi wasiat yang ia buat atau (dan) sesudah dibayar hutangnya. (Tentang) orang tuamu dan anak-anakmu, kamu tidak mengetahui siapa di antara mereka yang lebih dekat Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha Bijaksana.<sup>27</sup>

3. Allah berfirman dalam QS. An-Nisa/4 : 12.

<sup>26</sup> Kementerian Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an Dan Terjemahnya*, h. 101.

<sup>27</sup> Kementerian Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, h. 101-102.



وَلَكُمْ نِصْفُ مَا تَرَكَ أَزْوَاجُكُمْ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُنَّ وَلَدٌ فَإِنْ كَانَ  
لَهُنَّ وَلَدٌ فَلَكُمْ أَلْرُبْعُ مِمَّا تَرَكَنَّ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِيَنَّ بِهَا  
أَوْ دَيْنٍ وَلَهُنَّ أَلْرُبْعُ مِمَّا تَرَكَتُمْ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَكُمْ وَلَدٌ فَإِنْ  
كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكَتُمْ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ  
تُوصُونَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ وَإِنْ كَانَ رَجُلٌ يُورَثُ كَلَالَةً أَوْ امْرَأَةٌ وَلَهُ  
أَخٌ أَوْ أُخْتٌ فَلِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا أَلْسُدُسُ فَإِنْ كَانُوا أَكْثَرَ مِنْ  
ذَلِكَ فَهُمْ شُرَكَاءُ فِي الثُّلُثِ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصَىٰ بِهَا أَوْ دَيْنٍ غَيْرِ  
مُضَارٍّ وَصِيَّةً مِّنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَلِيمٌ ﴿١٢﴾

Terjemahnya :

Dan bagimu (suami-suami) seperdua dari harta yang ditinggalkan oleh isteri-isterimu, jika mereka tidak mempunyai anak. jika isteri-isterimu itu mempunyai anak, Maka kamu mendapat seperempat dari harta yang ditinggalkannya sesudah dipenuhi wasiat yang mereka buat atau (dan) seduah dibayar hutangnya. Para isteri memperoleh seperempat harta yang kamu tinggalkan jika kamu tidak mempunyai anak. jika kamu mempunyai anak, Maka Para isteri memperoleh seperdelapan dari harta yang kamu tinggalkan sesudah dipenuhi wasiat yang kamu buat atau (dan) sesudah dibayar hutang-hutangmu. jika seseorang mati, baik laki-laki maupun perempuan yang tidak meninggalkan ayah dan tidak meninggalkan anak, tetapi mempunyai seorang saudara laki-laki (seibu saja) atau seorang saudara perempuan (seibu saja), Maka bagi masing-masing dari kedua jenis saudara itu seperenam harta. tetapi jika saudara-saudara seibu itu lebih dari seorang, Maka mereka bersekutu dalam yang sepertiga itu, sesudah dipenuhi wasiat yang dibuat olehnya atau sesudah dibayar hutangnya dengan tidak memberi mudharat (kepada ahli waris). (Allah menetapkan yang demikian itu sebagai) syari'at yang benar-benar dari Allah, dan Allah Maha mengetahui lagi Maha Penyantun.<sup>28</sup>

<sup>28</sup> Kementerian Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an Dan Terjemahnya*, h. 102-103.

4. Allah berfirman dalam QS. An-Nisa/4 : 176.

يَسْتَفْتُونَكَ قُلِ اللَّهُ يُفْتِيكُمْ فِي الْكَلَالَةِ ۚ إِنِ امْرُؤٌ هَلَكَ لَيْسَ لَهُ وَلَدٌ وَلَهُ أُخْتُ فَلَهَا نِصْفُ مَا تَرَكَ ۚ وَهُوَ يَرِثُهَا إِن لَّمْ يَكُنْ لَهَا وَلَدٌ ۚ فَإِن كَانَتَا اثْنَتَيْنِ فَلَهُمَا الثُّلَثَانِ مِمَّا تَرَكَ ۚ وَإِن كَانُوا إِخْوَةً رِّجَالًا وَنِسَاءً فَلِلَّذَكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنثَيَيْنِ ۚ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ أَن تَضِلُّوا ۚ وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ

Terjemahnya:

Mereka meminta fatwa kepadamu (tentang kalalah). Katakanlah: "Allah memberi fatwa kepadamu tentang kalalah (yaitu): jika seorang meninggal dunia, dan ia tidak mempunyai anak dan mempunyai saudara perempuan, Maka bagi saudaranya yang perempuan itu seperdua dari harta yang ditinggalkannya, dan saudaranya yang laki-laki mempusakai (seluruh harta saudara perempuan), jika ia tidak mempunyai anak, tetapi jika saudara perempuan itu dua orang, Maka bagi keduanya dua pertiga dari harta yang ditinggalkan oleh yang meninggal. dan jika mereka (ahli waris itu terdiri dari) saudara-saudara laki dan perempuan, Maka bahagian seorang saudara laki-laki sebanyak bahagian dua orang saudara perempuan. Allah menerangkan (hukum ini) kepadamu, supaya kamu tidak sesat. Dan Allah Maha mengetahui segala sesuatu.<sup>29</sup>

Selain dari Al-Qur'an, terdapat pula hadis yang menerangkan tentang hukum kewarisan adalah sebagai berikut:

حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ حَدَّثَنَا وَهَيْبٌ حَدَّثَنَا ابْنُ طَاوُسٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ أَلْحِقُوا الْفَرَائِضَ بِأَهْلِهَا فَمَا بَقِيَ فَهُوَ لِأُولَى رَجُلٍ زَكَرٍ

Artinya:

<sup>29</sup> Kementerian Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an Dan Terjemahnya*, h. 139-140.

Ibnu Abbas r.a meriwayatkan bahwa Nabi saw. Bersabda, berikanlah harta waris kepada orang-orang yang berhak. Sesudah itu, sisanya (kepada pihak) laki-laki yang lebih utama”. (HR. Bukhari dan Muslim).<sup>30</sup>

Hadis Rasulullah dari Huzail bin Syurahbil yang diriwayatkan oleh Bukhari, Abu Dawud, At-Tirmizi, dan Ibn Majah. Abu Musa ditanya tentang pembagian harta warisan seorang anak perempuan, cucu perempuan dari anak laki-laki dan saudara perempuan. Bu Musa berkata : Untuk anak perempuan seperdua dan untuk saudara perempuan seperdua. Datanglah kepada Ibn Mas’ud , tentu dia akan mengatakan seperti itu pula. Kemudian ditanyakan kepada Ibn Mas’ud dan ia menjawab: Saya menetapkan atas dasar apa yang telah ditetapkan oleh Rasulullah, yaitu untuk anak perempuan seperdua untuk melengkapi dua pertiga cucu seperenam, dan selebihnya adalah untuk saudara perempuan.<sup>31</sup>

Hadis Rasulullah dari Qabisah bin Syu’aib yang diriwayatkan oleh Perawi yang lima selain an-Nasai. Seorang nenek orang yang meninggal datang kepada Abu Bakar meminta hak kewarisan dari cucunya (yang meninggal itu). Abu Bakar berkata : Dalam kitab Allah tidak disebutkan sesuatu untukmu dan juga tidak ada dalam hadis Rasulullah. Pulang sajalah dulu, nanti saya tanyakan kepada orang lain kalau ada yang mengetahui. Kemudian Abu Bakar menanyakan kepada para sahabat mengenai hal tersebut. Mugirah menjawab pertanyaan Abu Bakar dan berkata: Saya pernah melihat padaa saat Rasulullah memberikan hak kewarisan untuk nenek orang yang meninggal sebanyak seperenam. Abu Bakar bertanya: Apakah ada yang lain yang mengetahui selain kamu? Muhammad bin Masalamah

---

<sup>30</sup> Abdillah Mustari, *Hukum Waris (Perbandingan Hukum Islam Dan Undang-undang Hukum Perdata Barat (Burgerlijk Wetboek)*, h. 33.

<sup>31</sup> Zainuddin Ali, *Hukum Perdata Islam Di Indonesia*, h.109.

tampil dan mengatakan seperti yang dikatakan oleh Mugirah. Kemudian Abu Bakar memberikan seperenam kepada nenek harta peninggalan cucunya.<sup>32</sup>

Hadis Rasulullah dari Sa'ad bin Waqqas yang diriwayatkan oleh Bukhari. Sa'ad bin Waqqas bercerita sewaktu ia sakit keras, Rasulullah mengunjunginya. Ia bertanya kepada Rasulullah: Saya mempunyai harta yang banyak, sedangkan saya hanya mempunyai seorang anak perempuan yang akan mewarisi harta saya. Saya sedekahkanlah dua pertiga harta saya? Rasulullah menjawab : Jangan! Kemudian bertanya lagi Sa'ad: Bagaimanakah jika seperduanya? Rasulullah menjawab lagi: Jangan! Kemudian bertanya lagi Sa'ad: Bagaimanakah jika sepertiga? Berdabda Rasulullah: Sepertiga cukup banyak. Sesungguhnya jika engkau meninggalkan anakmu dalam keadaan berkecukupan adalah lebih baik daripada meninggalkannya dalam keadaan miskin (berkekurangan), sehingga meminta-minta kepada orang lain.<sup>33</sup>

Hadis Rasulullah dari Wasilah bin Al-Aska yang diriwayatkan oleh At-Tirmidzi, Abu Dawud, dan Ibn Majah. Wasilah bin Al-Asqa menceritakan bahwa Rasulullah bersabda: Perempuan menghimpun tiga macam hak mewaris yaitu (1) mewarisi budak lepasnya, (2) anak zinanya, dan (3) mewarisi anak li'annya.<sup>34</sup>

Hadis Rasulullah dari Datuk Umar bin Syu'aib yang diriwayatkan oleh At-Tirmizi, Abu Dawud, dan Ibn Majah. Datuk Umar bin Syu'aib menceritakan bahwa Rasulullah bersabda: Laki-laki yang berzina dengan seorang perempuan

---

<sup>32</sup> Zainuddin Ali, *Hukum Perdata Islam Di Indonesia*, h.109.

<sup>33</sup> Zainuddin Ai, *Hukum Perdata Islam Di Indonesia*, h. 109-110.

<sup>34</sup> Zainuddin Ali, *Hukum Perdata Islam Di Indonesia*, h. 109.

perempuan pelacur sampai perempuan itu melahirkan anak, maka anak yang lahir dari perbuatan zina itu tidak mewarisinya dan tidak diwarisinya.

Selain dari Al-Qur'an dan Hadis Rasulullah, terdapat pula sumber hukum dari Ijma' Para Sahabat dan Ulama:

Para sahabat nabi, tabi'in (generasi setelah sahabat), dan tabi'it tabi'in (generasi setelah tabi'in), telah berijma' atau bersepakat tentang legalitas ilmu faraid ini dan tiada seorang pun yang menyalahi ijma' tersebut. Kalangan sahabat nabi yang terkenal dengan pengetahuan ilmu faraidnya ada empat. Mereka adalah Ali bin Abi Thalib, Abdullah bin Abbas, Zaid bin Tsabit, dan Abdullah bin Mas'ud. Apa yang mereka sepakati atas sebuah masalah faraid, maka umat Islam akan menyetujuinya, kendatipun terdapat perbedaan pendapat diantara mereka dalam satu masalah tertentu.

Imam Syasyafi'i dan sebagian ulama yang lainnya telah memilih mazhab zaid bin Tsabit, karena sabda Rasulullah SAW., "Zaid telah mengajarkan ilmu faraid kepada kalian". Al-Qaffal berkata, "Pendapat Zaid bin Tsabit dalam masalah faraid tidak pernah diabaikan, bahkan semua pendapat-pendapatnya yang diberikan oleh sahabat yang lain".<sup>35</sup>

### **3. Asas-Asas Kewarisan Islam**

Sebagai hukum agama yang terutama bersumber kepada wahyu Allah yang disampaikan oleh Nabi Muhammad SAW, hukum kewarisan Islam mengandung berbagai asas yang dalam beberapa hal berlaku pula pada hukum

---

<sup>35</sup> Abdillah Mustari, *Hukum Waris (Perbandingan Hukum Islam Dan Undang-Undang Hukum Perdata Barat (Burgerlijk Wetboek)*, h. 33-34.

kewarisan yang bersumber dari akal manusia. Di samping itu hukum kewarisan Islam dalam hal tertentu mempunyai corak tersendiri, berbeda dengan hukum kewarisan yang lain. Berbagai asas hukum ini memperlihatkan bentuk karakteristik dari hukum kewarisan itu.

Hukum kewarisan Islam digali dari keseluruhan ayat dalam Al-Qur'an dan penjelasan tambahan yang diberikan oleh Nabi Muhammad SAW dalam sunnahnya. Dalam pembahasan ini akan dikemukakan lima asas yang berkaitan dengan sifat peralihan harta kepada ahli waris, cara pemilikan harta oleh yang menerima, kadar jumlah harta yang diterima, dan waktu terjadinya peralihan harta itu. Asas-asas tersebut adalah asas ijbari, asas bilateral, asas individual, asas keadilan berimbang, dan asas semata akibat kematian.<sup>36</sup>

#### 1. Asas Ijbari

Kata ijbari secara leksikal mengandung arti paksaan (compulsory), yang melakukan sesuatu di luar kehendak sendiri. Pengertian wali mujbir dalam terminology fikih munakahat (perkawinan) mengandung arti si wali dapat mengawinkan anak gadisnya diluar kehendak anak gadisnya itu dan tanpa memerlukan persetujuan dari anak yang akan dikawinkannya itu. Begitu pula kata jabari dalam terminologi ilmu kalam mengandung arti paksaan, dengan arti semua perbuatan yang dilakukan oleh seseorang hamba bukanlah atas kehendak dari hamba tersebut, tetapi adalah kehendak dan

---

<sup>36</sup> Amir Syarifuddin, *Hukum Kewarisan Islam*, h. 21.

kekuasaan Allah, sebagaimana yang berlaku menurut aliran kalam jabariyah.<sup>37</sup>

Pemindahan harta orang yang telah meninggal dunia kepada ahli waris berlaku dengan sendirinya. Tidak ada individu maupun lembaga yang dapat menanggukannya. Individu, baik pewaris, ahli waris, apalagi individu di luar keluarga, tidak punya hak untuk menangguk dan untuk tidak menerima harta warisan. Mereka dipaksa (ijbar) memberikan dan menerima harta warisan sesuai dengan bagian masing-masing. Kalau misalnya, seorang ahli waris tidak mau menerima karena sudah berkecukupan atau alasan lainnya dia tetap akan mendapatkan bagiannya.<sup>38</sup>

Asas ijbari hukum kewarisan islam dapat dilihat dari beberapa segi, yaitu (1) dari pengalihan harta yang pasti terjadi setelah orang meninggal dunia. Hal ini dapat dilihat dari Al-Qur'an surah An-Nisaa'/4: 7 yang menjelaskan bahwa bagi laki-laki dan perempuan ada bagian warisan dari harta peninggalan ibu, bapak, dan keluarga dekatnya. Dari kata nasib atau bagian itu, dapat diketahui bahwa dalam jumlah harta yang ditinggalkan oleh pewaris, terdapat bagian atau hak ahli waris. Oleh karena itu, pewaris tidak perlu menjanjikan sesuatu yang akan diberikan kepada ahli warisnya sebelum ia meninggal dunia. Demikian juga halnya dengan ahli waris, tidak perlu meminta-minta hak kepada (calon) pewarisnya. Demikian juga bila unsur ijbari dilihat dari segi (2) jumlah harta yang sudah ditentukan bagi

---

<sup>37</sup> Amir Syarifuddin, *Hukum Kewarisan Islam*, h. 22.

<sup>38</sup> Abdul Ghofur Anshori, *Hukum Kewarisan Islam Di Indonesia (Eksistensi Dan Adaptasi)*, h. 20.

masing-masing ahli waris. Hal ini tercermin dalam kata *mafrudan* yang makna asalnya adalah ditentukan atau diperhitungkan. Selain itu, bila unsur *ijbari* dilihat dari (3) kepastian penerima harta peninggalan, yakni mereka yang mempunyai hubungan kekerabatan dan ikatan perkawinan dengan pewaris. Rincian ahli waris dan pembagiannya yang sudah pasti itu, tidak ada suatu kekuasaan manusia pun yang dapat mengubahnya. Unsur yang demikian, dalam kepustakaan hukum kewarisan Islam yang *sui generis* dapat disebut juga bersifat wajib dilaksanakan oleh ahli waris.<sup>39</sup>

## 2. Asas Bilateral

Istilah bilateral bila dikaitkan dengan sistem keturunan berarti kesatuan kekeluargaan, dimana setiap orang yang menghubungkan dirinya dalam hal keturunan kepada pihak ibu dan pihak bapaknya. Kalau dikaitkan dengan hukum kewarisan bermakna ahli waris dapat menerima hak kewarisan dari kedua belah pihak baik pihak kerabat laki-laki maupun pihak kerabat perempuan.<sup>40</sup>

Asas bilateral itu, mempunyai dua dimensi saling mewarisi dalam Al-Qur'an surah an-Nisaa' (4) ayat 7, 11, 12, dan 176, yaitu (1) antara anak dan orang tuanya, dan (2) antara orang yang bersaudara bila pewaris tidak mempunyai anak dan orang tua. Hal ini diuraikan sebagai berikut. *Pertama*, dimensi saling mewarisi antara anak dengan orang tuanya. Dalam Al-Qur'an surah an-Nisaa' (4) ayat 7 ditegaskan bahwa laki-laki dan perempuan berhak

---

<sup>39</sup> Zainuddin Ali, *Hukum Perdata Islam Di Indonesia*, h. 122.

<sup>40</sup> Abdul Ghofur Anshari, *Hukum Kewarisan Islam Di Indonesia (Eksistensi Dan Adaptasi)*, h. 20-21.



mendapat harta warisan dari ibu bapaknya. Demikian juga dalam garis hukum surah an-Nisa (4) ayat 11 ditegaskan bahwa anak perempuan berhak menerima warisan dari orang tuanya sebagaimana halnya dengan anak laki-laki dengan perbandingan bagian seorang anak laki-laki sama dengan bagian dua orang anak perempuan. *Kedua*, dimensi saling mewarisi antara orang yang bersaudara juga terjadi bila pewaris tidak mempunyai keturunan dan/orang tua. Kedudukan saudara sebagai ahli waris<sup>41</sup> dalam ayat 12 ditegaskan bahwa:

- a. Bila pewaris adalah seseorang laki-laki yang tidak memiliki ahli waris langsung (anak/ayah), maka saudara laki-laki dan/atau perempuannya berhak menerima bagian dari harta tersebut.
- b. Bila pewaris adalah seseorang perempuan yang tidak memiliki pewaris langsung (anak/ayah), maka saudara laki-laki dan/atau perempuan berhak menerima harta tersebut.

Dalam ayat 176 dinyatakan:

- a. Seseorang laki-laki yang tidak memiliki keturunan (ke atas dan ke bawah) sedangkan ia mempunyai saudara laki-laki dan perempuan, maka saudara-saudaranya itu berhak menerima warisannya.
- b. Seseorang perempuan yang tidak mempunyai keturunan (ke atas dan ke bawah) sedangkan dia mempunyai saudara laki-laki maupun perempuan, maka saudara-saudaranya itu berhak mendapatkan warisannya.<sup>42</sup>

---

<sup>41</sup> Zainuddin Ali, *Hukum Perdata Islam Di Indonesia*, h. 122-123.

<sup>42</sup> Amir Syarifuddin, *Hukum Kewarisan Islam*, h. 25.

Ayat Al-Qur'an dimaksud, menetapkan bahwa kewarisan saudara laki-laki dan saudara perempuan dengan pembagian yang berbeda dengan hak atau bagian yang diperoleh saudara dalam ayat 176 surah yang sama. Perbedaan itu menunjukkan adanya perbedaan dalam hal (orang) yang berhak menerima warisan. Oleh karena itu hak saudara, baik laki-laki maupun perempuan dalam ayat 12 adalah  $\frac{1}{6}$  atau  $\frac{1}{3}$ , sama pembagian ibu maka dapat ditarik suatu kesimpulan bahwa yang dimaksud dengan saudara-saudara dalam ayat 12 itu adalah saudara garis ibu, sedangkan saudara-saudara dalam ayat 176 adalah saudara garis ayah atau ayah dan ibu. Dengan mendalami makna surah an-Nisaa' (4) ayat 12 dan 176 tersebut diperoleh satu kesimpulan bahwa pada garis kerabat ke samping pun berlaku kewarisan dua arah, melalui arah ayah dan arah ibu.<sup>43</sup>

### 3. Asas Individual

Pengertian asas individual ini adalah setiap ahli waris (secara individu) berhak atas bagian yang didapatnya tanpa terikat kepada ahli waris lainnya (sebagaimana halnya dengan pewarisan kolektif yang dijumpai di dalam kalangan hukum adat. Dengan demikian bagian yang diperoleh oleh ahli waris dari harta pewaris, dimiliki secara perorangan, dan ahli waris yang lainnya tidak ada sangkut-paut sama sekali dengan bagian yang diperolehnya tersebut, sehingga individu masing-masing ahli waris bebas menentukan (berhak penuh) atas bagian yang diperolehnya. Ketentuan asas individual ini dapat di jumpai dalam ketentuan Al-Qur'an surat An-Nisaa'

---

<sup>43</sup> Zainuddin Ali, *Hukum Perdata Islam Di Indonesia*, h. 123-124.

ayat 7 yang mengemukakan bahwa bagian masing-masing (ahli waris secara individual) telah ditentukan.<sup>44</sup>

#### 4. Asas Keadilan Berimbang

Kata adil merupakan kata bahasa Indonesia yang berasal dari kata al-adlu (العدل).<sup>45</sup> Asas ini berarti bahwa dalam ketentuan hukum waris islam senantiasa terdapat keseimbangan antara hak dan kewajiban, antara hak yang diperoleh seseorang dan kewajiban yang harus ditunaikannya. Laki-laki dan perempuan mendapat hak yang sebanding dengan kewajiban yang dipikulnya masing-masing dalam kehidupan keluarga dan masyarakat.<sup>46</sup>

Dengan perkataan lain dapat dikemukakan bahwa faktor jenis kelamin tidaklah menentukan dalam hal kewarisan (kebalikan dari asas kesemibangan ini dijumpai dalam masyarakat yang menganut sistem garis keturunan patrilineal, yang ahli warisnya hanyalah keturunan laki-laki saja/garis kebapakan). Dasar hukum asas ini dapat dijumpai antara lain dalam ketentuan Al-Qur'an surat an-Nisaa' ayat 7, 11, 12, dan 176.<sup>47</sup>

#### 5. Asas Semata Akibat Kematian

Asas akibat kematian dalam hukum kewarisan islam berarti kewarisan ada kalau ada yang meninggal dunia, kewarisan ada sebagai akibat dari meninggalnya seseorang. Oleh karena itu, pengalihan harta

---

<sup>44</sup> Suhrawardi K. Lubis dkk, *Hukum Waris Islam (Lengkap & Praktis)* (Jakarta: Sinar Grafika, t.th.), h. 37.

<sup>45</sup> Amir Syarifuddin, *Hukum Kewarisan Islam*. H. 28

<sup>46</sup> Abdul Ghofur Anshori, *Hukum Kewarisan Islam Di Indonesia (Eksistensi Dan Adaptasi)*, h. 22.

<sup>47</sup> Sahrawardi K. Lubis, *Hukum Waris Islam (Lengkap & Praktis)*, h. 37.

seseorang kepada orang lain yang disebut kewarisan, terjadi setelah orang yang mempunyai harta itu meninggal dunia. Ini berarti bahwa harta seseorang tidak dapat beralih kepada orang lain selama orang yang mempunyai harta itu masih hidup. Demikian juga, segala bentuk pengalihan harta seseorang yang masih hidup kepada orang lain, baik secara langsung maupun yang akan dilaksanakan kemudian sesudah meninggalnya, tidak termasuk ke dalam kategori kewarisan menurut hukum Islam.<sup>48</sup>

#### **4. Unsur-unsur Kewarisan**

Adapun unsur-unsur kewarisan yakni:

##### **1. Pewaris**

Pewaris adalah orang yang pada saat meninggalnya beragama islam, meninggalkan harta warisan dan ahli waris yang masih hidup. Istilah pewaris secara khusus dikaitkan dengan suatu proses pengalihan hak atas harta dari seseorang yang telah meninggal dunia kepada keluarganya yang masih hidup. Seseorang yang masih hidup dan mengalihkan haknya kepada keluarganya tidak dapat disebut pewaris, meskipun pengalihan itu dilakukan pada saat menjelang kematiannya.<sup>49</sup>

##### **2. Harta Warisan**

---

<sup>48</sup> Zainuddin Ali, *Hukum Perdata Islam Di Indonesia*, h. 125-126.

<sup>49</sup> Zainuddin Ali, *Hukum Perdata Islam Di Indonesia*, h. 114

Harta warisan menurut hukum islam ialah segala sesuatu yang ditinggalkan oleh pewaris yang secara hukum dapat beralih kepada ahli warisnya.<sup>50</sup>

### 3. Ahli Waris

Ahli waris adalah orang yang berhak mewaris karena hubungan kekerabatan (nasab) atau hubungan perkawinan (nikah) dengan pewaris, beragama islam dan tidak terhalang karena hukum untuk menjadi ahli waris.<sup>51</sup>

### 5. *Bagian-Bagian Yang Diterima Ahli Waris*

Ketentuan pembagian harta yang telah ditetapkan oleh Al-Qur'an (furudh al-muqaddarah) adalah sebagai berikut:

#### 1. Ahli waris yang mendapat 1/2 harta waris

Ahli waris yang mendapat bagian setengah ada lima orang. Seorang diantaranya laki-laki dan empat orang lainnya perempuan:

- a. Suami, jika tidak ada anak atau cucu
- b. Anak perempuan, apabila hanya seorang diri, jika si mati tidak meninggalkan anak laki-laki.<sup>52</sup>
- c. Cucu perempuan dari anak laki-laki (keturunan), jika si mati tidak meninggalkan anak atau cucu laki-laki.
- d. Saudara perempuan sekandung apabila seorang diri.
- e. Saudara perempuan seayah.<sup>53</sup>

---

<sup>50</sup> Amir Syarifuddin, *Hukum Kewarisan Islam*, h. 215.

<sup>51</sup> Zainuddin Ali, *Hukum Perdata Islam Di Indonesia*, h. 115.

<sup>52</sup> Muammar M. Bakry, *Akuntansi Dasar Mawaris (Cara Cepat Membagi Harta Pusaka Secara Syar'i)* (Cet. I; Jakarta: Alauddin University Press, 2014), h. 35.

## 2. Ahli waris yang mendapat 1/3 harta waris

Para ahli waris yang mendapat 1/3 bagian terdiri dari dua orang yaitu:

- a. Ibu, jika si mati tidak meninggalkan anak atau cucu dari anak laki-laki atau dua orang saudara.<sup>54</sup>
- b. Dua orang saudara atau lebih dari saudara yang seibu, baik laki-laki maupun perempuan.<sup>55</sup>

## 3. Ahli Waris Yang Mendapat 1/4 Harta waris

Para ahli waris yang mendapat 1/4 terdiri dari dua orang yaitu:

1. Suami, jika ada anak atau cucu dari anak laki-laki.
2. Istri, seorang atau lebih jika si mayit tidak meninggalkan anak atau cucu.<sup>56</sup>

## 4. Ahli Waris Yang Mendapat 1/6

Para ahli waris yang mendapat 1/6 terdiri dari tujuh orang yaitu:

1. Ayah mendapat seperenam bila pewaris mempunyai anak, baik anak laki-laki atau anak perempuan.
2. Kakek Sahih (ayahnya ayah) dan terus ke atas mendapat seperenam apabila orang yang meninggal mempunyai anak atau cucu dari anak laki-laki dan terus ke bawah, dengan syarat tidak ada ayah (dari orang yang meninggal).

---

<sup>53</sup> Beni Ahmad Saebani, *Fiqh Mawaris* (Cet. I; Bandung: Pustaka Setia, 2009), h. 141.

<sup>54</sup> Muammar M. Bakry, *Akuntansi Dasar Mawaris (Cara Cepat Membagi Harta Pusaka Secara Syar'i)*, h. 36.

<sup>55</sup> Beni Ahmad Saebani, *Fiqh Mawaris*, h. 146.

<sup>56</sup> Muammar M. Bakry, *Akuntansi Dasar Mawaris (Cara Cepat Membagi Harta Pusaka Secara Syar'i)*, h. 35.

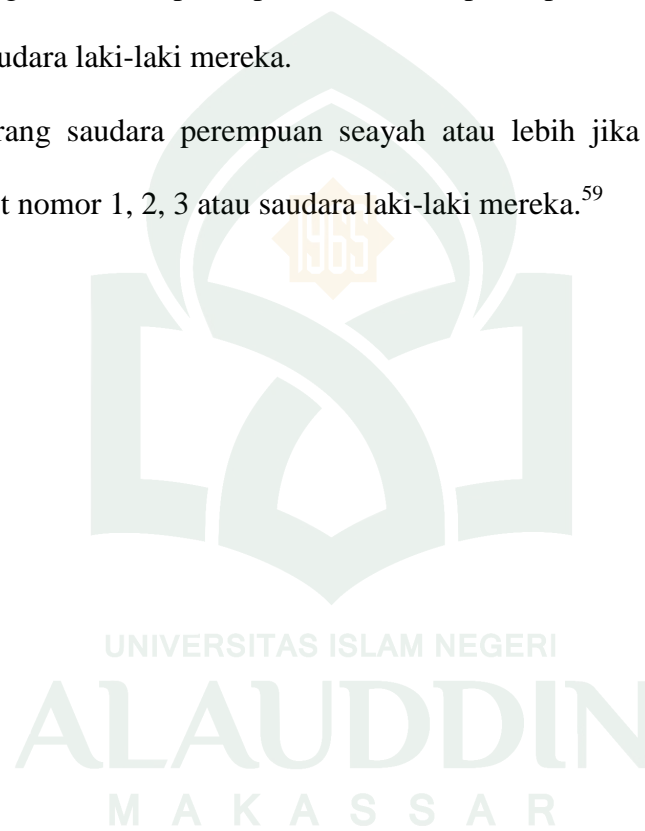
3. Ibu mengambil bagian seperenam dari harta yang ditinggalkan pewaris, dengan dua syarat: *pertama*, bila pewaris mempunyai anak laki-laki atau perempuan atau cucu laki-laki keturunan anak laki-laki. *Kedua*, bila pewaris mempunyai dua orang saudara atau lebih, baik saudara laki-laki ataupun perempuan, baik sekandung, seayah, ataupun seibu.
  4. Cucu perempuan dari keturunan dari keturunan anak laki-laki seorang atau lebih akan mendapat bagian seperenam apabila yang meninggal (pewaris) mempunyai satu anak perempuan.
  5. Saudara perempuan seayah atau satu orang atau lebih akan mendapat bagian seperenam apabila pewaris mempunyai seorang saudara sekandung perempuan.
  6. Saudara laki-laki atau perempuan seibu akan mendapat bagian masing-masing seperenam bila mewarisi sendirian.
  7. Nenek sahlah mendapatkan bagian seperenam ketika pewaris tidak lagi mempunyai ibu.<sup>57</sup>
5. Ahli Waris Yang Mendapat  $\frac{1}{8}$  Harta Waris
- Para ahli waris yang mendapat  $\frac{1}{8}$  hanya satu orang yaitu:
1. Istri seorang atau lebih, apabila ada anak atau cucu.<sup>58</sup>
6. Ahli Waris Yang Mendapat  $\frac{2}{3}$  Harta Waris
- Para ahli waris yang mendapat  $\frac{2}{3}$  terdiri dari empat orang yaitu:

---

<sup>57</sup> Beni Ahmad Saebani, *Fiqh Mawaris*, h.147-150.

<sup>58</sup> Muammar M. Bakry, *Akuntansi Dasar Mawaris (Cara Cepat Membagi Harta Pusaka Secara Syar'i)*, h. 35.

1. Dua orang anak perempuan atau lebih, jika mereka tidak mempunyai saudara laki-laki.
2. Dua cucu perempuan atau lebih dari anak laki-laki, jika mereka tidak ada anak perempuan atau saudara laki-laki.
3. Dua orang saudara perempuan sekandung atau lebih jika si mati tidak meninggalkan anak perempuan atau cucu perempuan dari anak laki-laki atau saudara laki-laki mereka.
4. Dua orang saudara perempuan seayah atau lebih jika tidak ada yang tersebut nomor 1, 2, 3 atau saudara laki-laki mereka.<sup>59</sup>



---

<sup>59</sup> Muammar M. Bakry, *Akuntansi Dasar Mawaris (Cara Cepat Membagi Harta Pusaka secara Syar'i)*, h. 36



### **BAB III**

#### **METODOLOGI PENELITIAN**

Untuk mendapatkan kajian yang dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah, maka dalam menelaah data, menjelaskan dan menyimpulkan objek pembahasan, maka penulis menempuh metode sebagai berikut:

##### ***A. Jenis dan Lokasi Penelitian***

###### **1. Jenis Penelitian**

Zainuddin Ali memberikan pengertian tentang metode penelitian kualitatif, yakni penelitian yang mengacu pada norma hukum yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan dan putusan pengadilan serta norma-norma yang hidup dan berkembang dalam masyarakat.<sup>1</sup> Terkait dengan penelitian yang akan diteliti, maka jenis penelitian ini merupakan penelitian lapangan (*field research*) kualitatif. Bila dilihat dari jenis datanya, penelitian ini termasuk penelitian kualitatif deskriptif karena data-data yang dianalisis itu berupa deskripsi dari gejala-gejala yang diamati dan mengkaji lebih mendalam dengan menguraikan secara terperinci data di lapangan. Menguraikan secara rinci yang dimaksud oleh penulis adalah menggambarkan dan memaparkan data hasil penelitian mengenai *Peranan Mediator Dalam Penyelesaian Sengketa Kewarisan Pada Pengadilan Agama Sengkang Kelas I B* baik yang bersumber dari observasi, wawancara, maupun dokumentasi. Dari data itulah kemudian

---

<sup>1</sup> Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum* (Jakarta: Sinar Grafika, 2009), h. 105.

didapatkan berbagai data dari berbagai sumber mengenai peranan mediator dalam penyelesaian sengketa pada Pengadilan Agama Sengkang Kelas I B.

## 2. Lokasi Penelitian

Penelitian ini berlangsung di Pengadilan Agama Sengkang Kelas 1B Kabupaten Wajo Sulawesi Selatan. Dalam hal ini penulis ingin mengetahui tentang bagaimana Pengadilan Agama Sengkang dalam mendamaikan pihak yang bersengketa termasuk bagaimana peranan mediator dalam penyelesaian sengketa kewarisan.

### **B. Pendekatan Penelitian**

Adapun metode pendekatan penelitian yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Pendekatan lagalitas formal adalah landasan hukum,yaitu pendekatan yang mengacu pada perangkat perundang-undangan yang mengatur tentang masalah yang diteliti.
- b. Pendekatan sosial (non doktrinal) dengan mengkaji fakta-fakta lapangan serta menelaah pula berbagai referensi yang relevan dengan masalah yang akan diteliti.

### **C. Jenis Dan Sumber Data**

#### a. Jenis data

1. Data primer yaitu data yang diperoleh langsung dari sumbernya, baik melalui wawancara, observasi, maupun laporan dalam bentuk dokumen tidak resmi yang kemudian diolah oleh peneliti.

2. Data sekunder yaitu data yang diperoleh dari dokumen-dokumen resmi, buku-buku yang berhubungan dengan objek penelitian, hasil penelitian dalam bentuk laporan, skripsi, tesis disertasi, dan peraturan perundang-undangan.<sup>2</sup>

b. Sumber data

Sumber data yang diperoleh yakni berupa data primer yang diperoleh langsung dari sumbernya atau yang disebut dengan narasumber. Narasumber ini dipilih karena kedudukannya atau kemampuannya yang dianggap dapat menjelaskan secara rinci tentang masalah yang dijadikan objek penelitian. Dan juga sumber yang diperoleh dari buku dan tulisan-tulisan ilmiah hukum yang terkait dengan objek penelitian ini.

#### **D. Metode Pengumpulan Data**

Metode pengumpulan data yang digunakan:

1. Penelitian Kepustakaan (Library Research)

Penelitian Kepustakaan (library research) yakni penelitian dengan melakukan penelitian kepustakaan yaitu menggunakan dan mengutip buku dan pembahasan yang sesuai dengan masalah yang diteliti, yaitu dengan membaca dan menelaah buku-buku yang relevan atau sumber lain seperti jurnal dan lain-lain. Dalam melakukan kutipan atau menggunakan metode ini, peneliti menggunakan dua jenis kutipan yakni kutipan langsung dan kutipan tidak langsung. Kutipan langsung adalah dengan memindahkan seluruh atau

---

<sup>2</sup> Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, h. 106.

sebagian pembahasan yang sesuai dengan penelitian tanpa mengubah redaksi kalimat, sedangkan kutipan tidak langsung adalah dengan menggunakan redaksi kalimat yang berbeda tapi memiliki substansi atau maksud yang sama.

## 2. Penelitian Lapangan (Field Research)

Penelitian lapangan (field research) adalah penelitian yang dilakukan di lapangan yakni melakukan interaksi langsung dengan objek penelitian dengan terlibat langsung di lokasi penelitian. Dalam studi lapangan ini peneliti akan melakukan penelitian di Pengadilan Agama Sengkang Kelas 1B. Penelitian ini didasari untuk mengetahui tentang bagaimana peranan mediator dalam penyelesaian sengketa kewarisan dengan melakukan berbagai cara seperti melakukan wawancara dan lain-lain.

### ***E. Instrumen Penelitian***

Instrumen penelitian adalah merupakan alat bantu bagi peneliti dalam mengumpulkan data. Pengumpulan data pada prinsipnya merupakan suatu aktivitas yang bersifat operasional agar tindakannya sesuai dengan pengertian penelitian sebenarnya. Data yang diperoleh melalui penelitian ini akan diolah menjadi suatu informasi yang merujuk kepada hasil penelitian nantinya. Adapun instrumen yang peneliti gunakan dalam penelitian sebagai berikut:

#### 1. Observasi

Observasi adalah peninjauan secara cermat dan mengawasi secara teliti guna mendapatkan data yang lebih jelas serta mencatat secara sistematis hal-hal yang dianggap penting dan berkaitan dengan penelitian. Observasi di

maksudkan untuk mengumpulkan data dengan melihat langsung lapangan terhadap objek yang akan diteliti. Dalam penelitian ini penulis akan menggunakan alat bantu untuk memperlancar observasi di lapangan yaitu buku catatan dan juga kamera sehingga seluruh data-data yang diperoleh di lapangan dapat langsung di catat dan difoto sebagai bukti.

## 2. Wawancara

Wawancara adalah proses tanya jawab yang dilakukan oleh peneliti dan narasumber guna menggali dan mendalami objek penelitian yang diinginkan. Dalam melakukan wawancara tidak boleh sembarang orang yang diwawancarai melainkan memang orang yang berkompeten yang dapat memberikan informasi sehubungan dengan penelitian yang dilakukan.

## 3. Dokumentasi

Dokumentasi adalah proses pengumpulan, pemilihan, penyimpanan informasi seperti rekaman wawancara, foto, dan semua data- data yang diperoleh selama berada di lokasi penelitian yang sangat dibutuhkan sebagai data yang valid.

## ***F. Teknik Pengolahan dan Analisis Data***

Analisis data adalah proses mengorganisasi dan mengurut data ke dalam pola, kategori dan satu uraian besar. Tujuan analisis data ialah untuk menyederhanakan data ke dalam bentuk yang mudah dibaca. Teknik pendekatan deskriptif kualitatif merupakan suatu proses menggambarkan keadaan sasaran yang sebenarnya,

penelitian secara apa adanya sejauh apa yang peneliti dapatkan dari hasil observasi, wawancara, maupun dokumentasi. Analisis deskriptif digunakan untuk menggambarkan populasi yang sedang diteliti.

Untuk menganalisis data yang terkumpul nanti agar memperoleh kesimpulan yang valid maka digunakan teknik pengolahan dan analisis data dengan metode kualitatif. Adapun teknik dan interpretasi data yang akan digunakan yaitu:

1. Reduksi Data

Reduksi data merupakan bentuk analisis yang menajamkan, menggolongkan, mengarahkan, membuang yang tidak perlu dan mengorganisasi data dengan cara sedemikian rupa sehingga kesimpulan akhir dapat diambil. Peneliti mengolah teori ataupun informasi untuk mendapatkan kejelasan pada masalah. Baik data yang terdapat di lapangan maupun yang terdapat di kepustakaan. Data yang dikumpulkan dipilih secara selektif dan disesuaikan dengan permasalahan yang dirumuskan dalam penelitian. Kemudian dilakukan pengolahan dengan meneliti ulang data yang diperoleh.

2. Display data

Display data adalah penyajian dan pengorganisasian data ke dalam satu bentuk sehingga terlihat utuh. Dalam penyajian data dilakukan secara induktif yakni menguraikan setiap permasalahan dalam permasalahan penelitian dengan memaparkan secara umum kemudian menjelaskan secara spesifik.

3. Penarikan Kesimpulan

Langkah terakhir dalam menganalisis data kualitatif adalah penarikan kesimpulan verifikasi, setiap kesimpulan awal masih merupakan kesimpulan sementara yang akan berubah bila diperoleh data baru dalam pengumpulan data berikutnya. Kesimpulan-kesimpulan yang diperoleh selama di lapangan diverifikasi selama penelitian berlangsung dengan memikirkan kembali dan meninjau ulang catatan lapangan sehingga terbentuk penegasan kesimpulan.



## **BAB IV**

### **MEDIASI DALAM PENYELESAIAN SENGKETA KEWARISAN PADA PENGADILAN AGAMA SENGKANG KELAS I B**

#### ***A. Gambaran Umum Pengadilan Agama Sengkang Kelas I B***

Pengadilan Agama Sengkang Kelas I B tepatnya berada di Kabupaten Wajo dibangun pada tahun 1980 di atas areal tanah seluas 543 m<sup>2</sup> yang awalnya berkantor di Jl. Sultan Hasanuddin No. 15 Sengkang Kelurahan Maddukkelleng Kecamatan Tempe Kabupaten Wajo Provinsi Sulawesi Selatan. Dan Kemudian pada tanggal 21 April 2008 pindah ke kantor baru Jl. Beringin I yang telah diresmikan oleh Wakil Ketua Mahkamah Agung RI pada tanggal 27 Agustus 2008. Adapun sejarah terbentuk dan dasar hukum terbentuknya Pengadilan Agama Sengkang Kelas I B adalah sebagai berikut :<sup>1</sup>

#### **1. Sejarah Terbentuknya Pengadilan Agama Sengkang Kelas I B**

Berdirinya Pengadilan Agama Sengkang Kabupaten Wajo dapat kita lihat pertama kali pada pasal 1 Peraturan pemerintah Nomor 45 Tahun 1957 tentang pembentukan Pengadilan Agama /Mahkamah Syar'ah di luar Jawa dan Madura yang berbunyi “ Di tempat-tempat yang ada Pengadilan Negeri ada sebuah Pengadilan Agama/Mahkamah Syari'ah yang daerah hukumnya sama dengan daerah hukum Pengadilan Negeri “.

Selanjutnya oleh Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1957 tersebut menentukan nama-nama tempat di mana akan dibentuk Pengadilan Agama

---

<sup>1</sup>Sumber Data: Kantor Pengadilan Agama Sengkang Kelas I B.



/Mahkamah Syari'ah dan Pengadilan Agama/Mahkamah Syari'ah Sengkang tercantum dalam daftar-daftar nomor Pengadilan Agama /Mahkamah Syari'ah.

Namun demikian bukan berarti secara otomatis Pengadilan Agama sengkang Kabupaten Wajo telah terbentuk, sebab pada pasal 12 dari Peraturan Pemerintah tersebut menyatakan “pelaksana dari peraturan ini diatur oleh Menteri Agama”.

Kemudian pada tanggal 6 Maret 1950 keluarlah Penetapan Menteri Agama Nomor 5 Tahun 1958 tentang pembentukan Pengadilan Agama/Mahkamah Syari'ah di Sulawesi, Nusa Tenggara, Maluku dan Irian Barat sebagai realisasi dari pasal 12 Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1957.

Dalam penetapan Menteri Agama Nomor 5 Tahun 1958 tersebut menetapkan bahwa dalam nomor urut 17 (tujuh belas) akan dibentuk Pengadilan Agama /mahkamah Syari'ah Sengkang Kabupaten Wajo.

Akan tetapi dengan dasar penetapan Menteri Agama tersebut Pengadilan Agama/Mahkamah Syariah Sengkang Kabupaten Wajo belum dapat melaksanakan tugasnya sebagai salah satu badan peradilan yang resmi karena di samping belum ada kantornya juga belum ada pegawainya. Barulah pada tahun 1959 diangkat 3 (tiga) orang pegawai Pengadilan Agama Sengkang Kabupaten Wajo, tetapi masih terbentur pada masalah belum adanya pejabat Ketua yang ditunjuk sebagai pimpinan, sehingga Pengadilan Agama Sengkang Kabupaten Wajo pada waktu itu belum dapat berjalan. Dan nanti pada tanggal 1 Juni 1960 Pengadilan Agama Sengkang Kabupaten Wajo resmi terbentuk baik dari segi yuridis formil maupun dari segi kenyataan, karena pada waktu itu Pengadilan Agama Sengkang Kabupaten Wajo diresmikan dan sekaligus pelantikan Bapak

K.H.Hamzah badawi sebagai Panitera merangkap Pejabat Ketua berdasarkan surat Keputusan Menteri Agama No : C/Im-17/1396 tanggal 3 Maret 1960 terhitung mulai tanggal 1 Maret 1960 sebagai pindahan dari pegawai Kantor Urusan Agama Kabupaten Wajo.<sup>2</sup>

## **2. Dasar Hukum Terbentuknya Pengadilan Agama Sengkang Kelas I B**

Pengadilan Agama Sengkang dibentuk berdasarkan Peraturan Pemerintah nomor 45 Tahun 1957 tentang Pembentukan Pengadilan Agama/Mahkamah Syariah di luar Jawa dan Madura. Perkembangan berikutnya terjadi perubahan nama serta wilayah hukum dan lokasi Pengadilan Agama/Mahkamah Syariah berdasarkan Penetapan Menteri Agama Nomor 5 Tahun 1958.

## **3. Wilayah Hukum Pengadilan Agama Sengkang Kelas I B**

Kabupaten Daerah Tk II Wajo Propinsi Sulawesi-selatan adalah daerah yurisdiksi PA Sengkang yang memiliki luas wilayah .2.506,19 km<sup>2</sup> yang terdiri atas 14 Kecamatan, 48 kelurahan dan 128 Desa dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara kabupaten Luwu
- Sebelah Selatan Kabupaten Soppeng dan Kabupaten Bone.
- Sebelah Timur Teluk Bone.
- Sebelah Barat Kabupaten Soppeng dan Kabupaten sidrap.

NO.	KECAMATAN	IBU KOTA KECAMATAN	JUMLAH KELURAHAN/DESA
1	Sabbangparu	Kota Baru	15

<sup>2</sup>Sumber data: Kantor Pengadilan Agama Sengkang Kelas I B.



#### **4. Visi dan Misi Pengadilan Agama Sengkang Kelas I B**

##### **VISI**

“ Terwujudnya Pengadilan Agama Sengkang Sebagai Bagian Pengadilan  
Indonesia yang Agung”

##### **MISI**

Misi Pengadilan Agama Sengkang adalah sebagai berikut:

1. Mewujudkan pelayanan yang transparan, cepat, dan tepat waktu.
2. Mewujudkan kinerja yang professional.
3. Mewujudkan pembinaan dan pengawasan yang berkualitas.

#### **5. Perkara yang ditangani Pengadilan Agama Sengkang Kelas I B**

Pengadilan Agama Sengkang Kabupaten Wajo, seperti halnya Pengadilan Agama lainnya bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang; (a) Perkawinan, (b) Kewarisan, (c) Wasiat, (d) Hibah, (e) Wakaf, (f) Zakat, (g) Infaq, (h) Shadaqah, dan (i) Ekonomi Syariah. Dalam bidang perkawinan, Pengadilan Agama Sengkang menangani beberapa jenis perkara yaitu; izin poligami, dispensasi kawin, pencegahan perkawinan, penolakan perkawinan oleh Pegawai Pencatat Nikah, pembatalan perkawinan, gugatan kelalaian atas kewajiban suami dan istri, cerai talak, cerai gugat, penyelesaian harta bersama, penguasaan anak, pencabutan kekuasaan orang tua, penetapan ahli waris, pengangkatan anak, nafkah anak oleh ibu karena ayah tidak mampu, Hak-hak bekas istri/kewajiban bekas suami. Pencabutan orang lain sebagai wali oleh pengadilan, ganti rugi terhadap wali, asal-usul anak, penolakan kawin campuran, isbath nikah, wali

adhal, dan pernyataan tentang sahnya perkawinan yang terjadi sebelum Undang-Undang RI No.1 tahun 1974.<sup>3</sup>

***B. Proses yang Dilakukan Oleh Mediator Dalam Menyelesaikan Sengketa Kewarisan di Pengadilan Agama Sengkang Kelas I B***

Tiap Negara dan bangsa menghendaki adanya tatanan masyarakat yang tertib, tentram, damai dan seimbang sehingga setiap konflik, sengketa atau pelanggaran diharapkan untuk dipecahkan atau diselesaikan, hukum harus ditegakkan, setiap pelanggaran hukum harus secara konsisten ditindak, dikenai sanksi. Kalau setiap pelanggaran hukum ditindak secara konsisten maka akan timbul rasa aman dan damai, karena ada jaminan kepastian hukum. Pengadilan merupakan salah satu tumpuan harapan masyarakat para pencari keadilan atau pihak-pihak yang bersengketa. Dalam memberikan pelayanan hukum dan keadilan kepada masyarakat, pengadilan mempunyai tugas pokok yakni menerima, memeriksa, mengadili dan menyelesaikan setiap perkara yang diajukan kepadanya. Agar tugas pokok itu tercapai dengan baik, maka pengadilan haruslah:

- a. Memberikan perlakuan yang adil dan manusiawi kepada para pencari keadilan.
- b. Memberikan pelayanan yang simpatik dan bantuan yang diperlukan oleh pencari keadilan.
- c. Memberikan penyelesaian perkara secara efektif, efisien, tuntas dan final sehingga memuaskan kepada para pihak dan masyarakat.<sup>4</sup>

---

<sup>3</sup> Sumber data: Kantor Pengadilan Agama Sengkang Kelas I B.

<sup>4</sup>Yusna Zaidah, *Penyelesaian Sengketa Melalui Peradilan dan Arbitrase Syari'ah Di Indonesia*, h. 6002E

## 1. Pengertian mediasi

Mediasi adalah proses perdamaian suatu sengketa (mediasi) perdata di Pengadilan dimana yang bertindak sebagai penengah (mediator) adalah seorang hakim aktif yang bukan pemeriksa perkara yang dilakukan sebelum sidang perkara atau selama pemeriksaan perkara berlangsung sebelum jatuhnya putusan majelis hakim pemeriksa perkara.<sup>5</sup>

Berbicara masalah mediasi tentu mengarah kepada solusi yang akan didapat/diterima oleh kedua belah pihak yang bersengketa dengan cara yang berdasarkan musyawarah yang dihadiri oleh pihak-pihak yang bersengketa dengan dibantu oleh orang ketiga yang netral (mediator). Adapun pengertian mediasi menurut mediator Pengadilan Agama Sengkang Kelas I B adalah sebagai berikut:

Drs. Idris, M.H.I mengatakan bahwa:<sup>6</sup>

Mediasi adalah upaya penyelesaian suatu sengketa non litigasi, akan tetapi melalui upaya perdamaian di luar sidang dengan menghadirkan pihak-pihak yang bersengketa untuk diajak berembuk supaya menyelesaikan sengketa secara damai.

Drs. Muh. Arsyad, S.Ag mengatakan bahwa:<sup>7</sup>

Mediasi adalah proses penyelesaian perkara melalui perundingan untuk memperoleh kesepakatan dengan dibantu oleh mediator.

Dra. Narniati mengatakan bahwa:<sup>8</sup>

---

<sup>5</sup>Fatahillah A. Syukur, *Mediasi Yudisial di Indonesia: Peluang dan Tantangan dalam Memajukan Sistem Peradilan* (Cet. 1; Bandung: CV. Mandar Maju, 2012), h. 43.

<sup>6</sup> Hasil wawancara dengan Drs. Idris, M.H.I., Hakim Pengadilan Agama Sengkang, pada tanggal 8 Juni 2017.

<sup>7</sup> Hasil wawancara dengan Drs. Muh. Arsyad, S. Ag, Hakim Pengadilan Agama Sengkang pada tanggal 9 Juni 2017.

<sup>8</sup> Hasil wawancara dengan Dra. Narniati, S.H., M.H. Hakim Pengadilan Agama Sengkang pada tanggal 20 Juni 2017.

Mediasi adalah cara penyelesaian sengketa secara damai, tepat, efektif, dapat membuka akses yang lebih luas kepada para pihak untuk memperoleh penyelesaian yang memuaskan serta berkeadilan dengan dibantu oleh mediator.

Dra. Hj. Farida Mustafa mengatakan bahwa:<sup>9</sup>

Mediasi adalah sesuatu yang wajib dilakukan bila kedua belah pihak hadir di persidangan. Memediasi maksudnya di nasehati dan diberi pengertian agar bias berdamai dan dimaksimalkan.

Drs. H. Makka A mengatakan bahwa:<sup>10</sup>

Mediasi adalah menyelesaikan sengketa melalui proses perundingan untuk memperoleh kesepakatan dibantu oleh mediator.

## **2. Proses Perdamaian/ Mediasi**

- a. Dalam setiap perkara perdata, apabila kedua belah pihak hadir di persidangan, Hakim wajib mendamaikan kedua belah pihak.
- b. Dalam mengupayakan perdamaian harus mempedomani Peraturan Mahkamah Agung RI (PERMARI) Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Mediasi, yang mewajibkan agar semua perkara perdata yang diajukan ke Pengadilan tingkat pertama wajib untuk dilakukan perdamaian dengan bantuan mediator.
- c. Dalam setiap perkara perdata (selain perceraian), apabila kedua belah pihak hadir di persidangan majelis hakim langsung memerintahkan para pihak melakukan mediasi.

---

<sup>9</sup> Hasil wawancara dengan Dra. Hj. Faridah Mustafa, Hakim Pengadilan Agama Sengkang pada tanggal 20 Juni 2017.

<sup>10</sup> Hasil wawancara dengan Drs. H. Makka A., Hakim Pengadilan Agama Sengkang pada tanggal 8 Juni 2017.

- d. Dalam perkara perceraian sebelum majelis hakim memerintahkan para pihak melakukan mediasi, terlebih dahulu majelis hakim harus mendamaikan sesuai dengan ketentuan pasal 82 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 (hasil Rakernas MA Tahun 2012 di Manado).
- e. Dalam perkara selain perceraian pada sidang pertama hakim yang memeriksa perkara wajib:
- 1) Menjelaskan kewajiban para pihak untuk menempuh mediasi.
  - 2) Menyarankan para pihak untuk memilih mediator (mediator non hakim), dan apabila mediator dari hakim maka mediator ditetapkan oleh Ketua Majelis Hakim.
  - 3) Membuat penetapan mediator yang dipilih oleh para pihak. Jika para pihak gagal memilih mediator, majelis menunjuk mediator dari salah satu mediator yang ada dalam daftar mediator.
  - 4) Setelah penunjukan mediator, majelis menunda persidangan untuk memberikan kesempatan kepada para pihak menempuh mediasi paling lama 40 hari dan dapat diperpanjang 14 hari, apabila ada rekonsensi maka gugatan rekonsensi tersebut harus pula dimediasi.
  - 5) Terhadap perkara perceraian yang dikumulasikan dengan perkara lainnya dan ternyata mediasi perceraianya gagal, maka mediasi dilanjutkan terhadap perkara *assesoir* yaitu: *hadhanah*, harta bersama



dan lasin-lain. Apabila *assesoir* berhasil maka mediasi dilaporkan tidak berhasil.

- 6) Jika mediasi terhadap perkara *assesoir* ternyata berhasil dan dalam proses litigasi ternyata Majelis hakim berhasil pula mendamaikan perkara perceraian, maka kesepakatan para pihak tentang perkara *assesoir* tersebut tidak berlaku, sepanjang *assesoir* itu melekat pada perceraian seperti sengketa harta bersama, mut'ah dan nafkah iddah.
- 7) Apabila para pihak telah selesai melakukan mediasi, maka wajib untuk menghadap di persidangan.
- 8) Dalam hal persidangan belum ditentukan hari persidangan, maka majelis hakim menentukan hari sidang dan para pihak menunggu panggilan.
- 9) Mediator wajib memberitahukan secara tertulis hasil mediasi kepada Majelis Hakim sebelum persidangan dilaksanakan, hasil mediasi yang dinyatakan gagal/tidak berhasil/tidak layak, maka pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan membacakan surat gugatan.
- 10) Apabila mediasi berhasil dalam perkara (perceraian), maka hakim menyaranka kepada para pihak untuk mencabut perkaranya, tetapi apabila para pihak tidak mau mencabut perkaranya, majelis hakim memutus dengan tidak menerima gugatan Penggugat/Pemohon: Selain perkara perceraian hasil kesepakatan (perdamaian) dibuat dalam akta perdamaian dan dimasukkan dalam putusan.

- f. Dalam perkara perceraian upaya perdamaian dapat dilakukan dalam setiap persidangan dan pada semua tingkat peradilan (Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009).
- g. Dalam sidang perdamaian tersebut, suami istri harus dating secara pribadi, kecuali apabila salah satu pihak bertempat tinggal di luar negeri, dan tidak dapat datang menghadap secara pribadi dapat diwakili oleh kuasanya yang secara khusus dikuasakan untuk itu, dan apabila kedua belah pihak berada di luar negeri, maka Pemohon/Penggugat pada sidang perdamaian harus menghadap secara pribadi (Pasal 82 ayat (2) dan (3) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009).
- h. Jika terjadi perdamaian dalam pemeriksaan perkara *verzet* atas putusan *verstek* dalam perkara perceraian, maka Majelis Hakim membatalkan putusan *verstek* dengan amar sebagai berikut:
- 1) Menyatakan perlawanan pelawan dapat diterima.
  - 2) Menyatakan pelawan adalah pelawan yang benar.
  - 3) Membatalkan putusan *verstek* nomor... tanggal... bertepatan dengan tanggal...
  - 4) Menyatakan gugatan penggugat tidak dapat diterima.
  - 5) Membebaskan biaya perkara kepada pelawan sejumlah Rp...

- i. Jika terjadi perdamaian dalam pemeriksaan perkara *verzet* atas putusan *verstek* dalam perkara selain perceraian, maka majelis Hakim membatalkan putusan *verstek* dengan amar sebagai berikut:
  - 1) Menyatakan perlawanan pelawan dapat diterima.
  - 2) Menyatakan pelawan/tergugat adalah pelawan yang benar.
  - 3) Membatalkan putusan *verstek* nomor... tanggal...
  - 4) Menghukum kedua belah pihak untuk mentaati akta perdamaian tanggal...
  - 5) Membebankan biaya perkara kepada...sejumlah Rp...(.)
- j. Putusan perdamaian mempunyai kekuatan hukum yang sama dengan putusan hakim yang berkekuatan hukum tetap dan apabila tidak dilaksanakan, maka dapat dimintakan eksekusi kepada Ketua Pengadilan Agama yang bersangkutan.
- k. Putusan perdamaian tidak dapat dilakukan upaya hukum banding, kasasi dan peninjauan kembali (Pasal 83 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009).
- l. Jika tergugat lebih dari satu, dan yang hadir hanya sebagian, maka mediasi tetap dapat dijalankan dengan memanggil lagi tergugat yang tidak hadir secara sah dan patut dengan bantuan Ketua Majelis, dan jika tergugat yang bersangkutan juga tetap tidak hadir, maka mediasi berjalan hanya antara penggugat dengan tergugat yang hadir. Jika antara penggugat dengan tergugat yang hadir tercapai kesepakatan perdamaian, maka penggugat

mengubah gugatannya dengan cara meniadakan pihak tergugat yang objeknya lebih satu, yang salah satunya telah beralih kepada pihak ketiga yang tidak hadir maka gugatannya dirubah dengan menggugat tergugat yang hadir saja.

Contoh: dalam kasus harta bersama yang dikuasai oleh pihak ketiga yang tidak hadir yang objeknya lebih dari satu, yang salah satunya telah beralih kepada pihak ketiga yang tidak hadir maka gugatannya dirubah dengan menggugat tergugat yang hadir saja.

- m. Jika para pihak/ salah satu pihak menolak untuk mediasi setelah diperintahkan oleh Pengadilan, maka penolakan para pihak/salah satu pihak untuk mediasi dicatat dalam berita acara sidang dan dimuat dalam putusan.
- n. Jika terjadi perdamaian di tingkat banding, kasasi atau peninjauan kembali, maka dalam kesepakatan perdamaian dicantumkan klausula bahwa kedua belah pihak mengesampingkan putusan yang telah ada.
- o. Apabila ternyata dalam akta perdamaian terdapat *error in persona* maka perjanjian damai tersebut tidak sah.
- p. Yurisprudensi lain, putusan Mahkamah Agung Nomor 454 K/Pdt/1991 tanggal 29 Januari 1993 merumuskan norma akta perdamaian dapat dibatalkan jika isinya bertentangan dengan Undang-Undang (Pasal 1854 KUHPerdata “Setiap perdamaian hanya menyangkut soal yang termaktub di dalamnya; pelepasan segala hak dan tuntutan yang dituliskan di situ

harus diartikan sepanjang hak-hak dan tuntutan-tuntutan itu berhubungan dengan perselisihan yang menjadi sebab perdamaian tersebut).

- q. Perkara yang tidak wajib dimediasi adalah perkara volunteer dan perkara yang menyangkut legalitas hukum Islam, seperti pembatalan nikah, serta perkara yang salah pihaknya tidak hadir di persidangan.
- r. Mediasi dilaksanakan minimal sekali dalam penundaan sidang, tidak perlu ditunda dalam waktu yang tidak ditentukan, tetapi dalam sidang berikutnya langsung diberitahukan untuk hadir tanpa dipanggil lagi.<sup>11</sup>

Prosedur dan tahapan mediasi dalam perkara perdata pada umumnya, diatur dalam pasal 3 sampai pasal 14 Peraturan Mahkamah Agung RI No. 2 Tahun 2003 Jo PERMA Nomor. 1 Tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, dan PERMA Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan. Mediasi di pengadilan dibagi dalam dua tahap yaitu tahap pra mediasi dan tahapan pelaksanaan mediasi. Tahapan pramediasi adalah tahap dimana para pihak mendapatkan tawaran dari hakim untuk menggunakan jalur mediasi dan para pihak menunjuk mediator sebagai pihak ketiga yang akan membantu menyelesaikan sengketa mereka.<sup>12</sup>

Dalam menjalankan proses mediasi, mediator harus mampu menjalankan tugasnya sebagai pihak ketiga yang netral dalam memutuskan perkara, dan diberikan kebebasan untuk menciptakan kemungkinan terjadinya kesepakatan damai di antara kedua belah pihak yang bersengketa.

---

<sup>11</sup> M. Rum Nessa, *Membumikan Hukum Acara Peradilan Agama Di Indonesia* (Cet. I; Yogyakarta: UII Press, 2016), h. 89-93.

<sup>12</sup> Restiana, "Penyelesaian Sengketa Tanah Warisan Melalui Mediasi (Studi Kasus Di Pengadilan Agama Watampone Kelas 1B)", *Skripsi* (Makassar: Fak. Syariah dan Hukum UIN Alauddin, 2016), h. 93.

Menurut Drs. Idris, M.H.I ia mengatakan bahwa:

Apabila proses mediasi berhasil maka setelah itu dilanjutkan dengan satu kali proses persidangan dengan agenda memutuskan apa yang telah disepakati pada proses mediasi, namun apabila proses mediasi tidak berhasil maka tetap lanjut dengan agenda mengikuti semua proses/prosedur yang dijalankan oleh Pengadilan.<sup>13</sup>

Menurut Drs. H. Makka A. ia mengatakan bahwa:

Diupayakan kalau bisa selesai disitu (mediasi), tapi kalau mereka ngotot ya apa boleh buat. Maksudnya gini kalau dia selesai ditingkat mediasi berarti mereka itu kan damai, kalau damai disitu berarti ya udah tidak ada masalah kan, sisa dirumuskan bagaimana perdamaianya. Hasil perdamaian itu dibawa nanti ke ruangan sidang. Di ruangan sidang itu ya ada dua kemungkinan pihak, apakah dia cabut perkaranya atau dibuatkan penetapan putusan yang mengikat perdamaian tadi itu. Ya kalau damai kemudian masuk di persidangan dibuatkan putusan yang mengikat, kalau sudah diikat dengan dengan putusan itu berarti sudah punya hak eksekutor kan, itu sudah kuat tetapi tetap hasil perdamaianya mereka tunduk pada hasil perdamaianya kan.<sup>14</sup>

Menurut Dra. Narniati, S.H., M.H. ia mengatakan bahwa:

Memerintahkan para pihak menghadiri pertemuan mediasi, diupayakan secara maksimal, dilakukan paling lama 30 hari.<sup>15</sup>

Menurut Dra. Hj. Faridah Mustafa ia mengatakan bahwa:

Sama dengan perkara biasa hanya saja bukan satu kali saja dimediasi berulang-ulang bila belum damai.<sup>16</sup>

Menurut HIR, anjuran damai dari hakim sudah dilakukan (dalam sidang pertama) sebelum pembacaan surat gugatan. Anjuran damai sebenarnya dapat dilakukan kapan saja sepanjang perkara belum diputus, tetapi anjuran damai pada

---

<sup>13</sup> Hasil wawancara dengan Drs. Idris, M.H.I., Hakim Pengadilan Agama Sengkang, pada tanggal 8 Juni 2017.

<sup>14</sup> Hasil wawancara dengan Drs. H. Makka A., Hakim Pengadilan Agama Sengkang pada tanggal 8 Juni 2017.

<sup>15</sup> Hasil wawancara dengan Dra. Narniati, S.H., M.H. Hakim Pengadilan Agama Sengkang pada tanggal 20 Juni 2017.

<sup>16</sup> Hasil wawancara dengan Dra. Hj. Faridah Mustafa, Hakim Pengadilan Agama Sengkang pada tanggal 20 Juni 2017.

permulaan sidang pertama adalah bersifat “mutlak/wajib” dilakukan dan dicantumkan dalam berita acara sidang, karena ada keharusan yang menyatakan demikian, walaupun mungkin menurut logika, kecil sekali kemungkinannya. Pernah juga terjadi perdamaian tetapi kebanyakan bukan terjadi dalam sidang pertama.<sup>17</sup>

Kalau terjadi perdamaian maka dibuatkanlah akta perdamaian di muka pengadilan dan kekuatannya sama dengan putusan. Terhadap perkara yang sudah terjadi perdamaian tidak boleh lagi diajukan perkara, kecuali tantang hal-hal baru di luar itu. Akta perdamaian tidak berlaku banding sebab akta perdamaian bukan keputusan pengadilan. Bila tidak terjadi perdamaian, hal itu harus dicantumkan dalam berita acara sidang, sidang akan dilanjutkan.

### ***C. Efektivitas Yang Dicapai Mediator Dalam Menyelesaikan Sengketa Kewarisan Pada Pengadilan Agama Sengkang Kelas I B.***

Dalam proses mediasi, hakim sebagai mediator tidak memiliki kewenangan untuk memutus perkara seperti dalam sidang pengadilan (litigasi). Peran mediator dalam proses mediasi kemudian terbagi dua: apakah hanya sebagai fasilitator yang mengatur kelancaran proses mediasi (*facilitative approach*) atau bisa memberikan saran dan pertimbangan hukum (*evaluative approach*).<sup>18</sup>

Adapun pertanyaan dan jawaban dari informan/narasumber yaitu apakah mediasi di Pengadilan Agama Sengkang sudah efektif, Menurut Drs. Idris, M.HI

---

<sup>17</sup> Roihan A. Rasyid, *Hukum Acara Peradilan Agama* (Ed. 2 Cet. 10; Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2003), h. 97-98.

<sup>18</sup> Fatahillah A. Syukur, *Mediasi Yudisial di Indonesia: Peluang dan Tantangan dalam Memajukan Sistem Peradilan*, h. 43-44.

ia mengatakan bahwa kalau dilihat dari hasilnya belum, masih banyak yang berlanjut<sup>19</sup> hal ini sama dengan yang dikemukakan oleh Dra. Hj. Dzakiyyah, M.H dan Drs. H. Makka A, ia juga mengatakan bahwa belum, jarang berhasil, rata-rata tidak berhasil. Sedangkan menurut Dra. Narniati, S.H., M.H adalah dimediasi sampai batas waktu menurut PERMA No. 1 Tahun 2016, dengan adanya batas waktu yang ditentukan maka proses mediasi bisa dilakukan sepanjang waktu belum berakhir. Apabila mediasi gagal maka pasti perkara akan berlanjut dengan mengikuti prosedur yang berlaku di Pengadilan, dan apabila berlanjut maka hal inilah yang menunjukkan bahwa efektivitas yang dicapai masih kurang efektif.

Dari jawaban yang disampaikan oleh hakim yang juga selaku mediator di atas dapat dipahami bahwa setiap hakim memberikan jawaban yang hampir sama bahwa mediasi di Pengadilan Agama Sengkang Kelas I B memang sudah berjalan dengan baik atau sudah terlaksana dengan berdasarkan pada PERMA Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi Di Pengadilan namun kurang efektif. Untuk mengefektifkan mediasi memerlukan beberapa syarat agar bisa menangani sengketa dengan efektif, yaitu:

1. Para pihak yang bersengketa harus sama-sama memiliki keinginan untuk menyelesaikan sengketa secara damai.
2. Semua pihak harus beritikad baik dalam melangsungkan proses mediasi, karena kalau tidak, bisa dipakai sebagai taktik untuk mengulur-ulur waktu.

---

<sup>19</sup> Hasil wawancara dengan Drs. Idris, M.H.I., Hakim Pengadilan Agama Sengkang, pada tanggal 8 Juni 2017.



3. Kasus yang berkaitan dengan ideologi atau keyakinan pihak yang bersengketa yang tidak memberikan ruang untuk berkompromi tidak cocok untuk menggunakan mediasi sebagai penyelesaian sengketa.
4. Mediasi bukanlah metode yang tepat untuk menangani sengketa yang berkaitan dengan hak (*rights*) seseorang karena jenis sengketa ini lebih cocok untuk ditangani pengadilan dengan cara memutus. Mediasi lebih tepat dipakai untuk menangani sengketa yang berkaitan dengan kepentingan (*interests*).<sup>20</sup>

Efektivitas dari otoritas hakim yang juga selaku mediator dalam penyelesaian sengketa terlihat secara lebih nyata dalam lingkup Peradilan Agama yang menangani sengketa perdata antara orang yang beragama Islam, terutama dalam kasus perceraian dan kewarisan. Para pihak yang bersengketa di Peradilan Agama menganggap hakim tidak hanya sebagai orang yang memiliki otoritas sebagai pejabat pengadilan, tetapi juga memiliki pengetahuan mengenai hukum Islam yang menjadi dasar penyelesaian sengketa. Karenanya para pihak mau mendengar ucapan dan arahan hakim karena dipandang sebagai nasihat agama untuk mengutamakan penyelesaian sengketa secara damai.<sup>21</sup>

Adapun laporan perkara kewarisan dari tahun 2014-2016 dapat dilihat pada tabel berikut:<sup>22</sup>

---

<sup>20</sup> Fatahillah A. Syukur, *Mediasi Yudisial di Indonesia: Peluang dan Tantangan dalam Memajukan Sistem Peradilan*, h. 12.

<sup>21</sup> Fatahillah A. Syukur, *Mediasi Yudisial di Indonesia: Peluang dan Tantangan dalam Memajukan Sistem Peradilan*, h. 59.

<sup>22</sup> Sumber data: Kantor Pengadilan Agama Sengkang Kelas I B.

No.	Tahun	Perkara Kewarisan yang Diterima	Dicabut	Dikabulkan	Ditolak	Tidak Diterima	Digugurkan	Dicoret dari Register	Sisa Perkara
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	2014	5 (tahun ini)	1	0	0	1	0	0	3
2	2015	3 (dari tahun lalu) + 3 (tahun ini) = 6	0	1	0	0	0	0	5
3	2016	5 (dari tahun lalu) + 1 (tahun ini) = 6	0	2	0	0	0	0	4
Jumlah		9	1	3	0	1	0	0	4

**Sumber data: Kantor Pengadilan Agama Sengkang Kelas I B.**

Memperhatikan tabel tersebut yang menunjukkan perkara kewarisan yang ada di Pengadilan Agama Sengkang pada tahun 2014-2016 berjumlah 9 yang memiliki kualifikasi putusan diantaranya, dicabut 1, dikabulkan 3, tidak diterima 1. Dalam perkara kewarisan yang dimediasi di Pengadilan Agama Sengkang yang berhasil mencabut putusannya hanya 1 pada tahun 2014. Dan ini menunjukkan bahwa mediasi yang dilakukan oleh mediator di Pengadilan Agama Sengkang masih belum efektif. Hal ini bisa terjadi antara dua faktor yaitu mediator yang tidak berperan atau belum maksimal/efektif dalam memediasi para pihak, ataukah bisa jadi karena kesadaran masyarakat yang kurang memahami keadaannya sebagai makhluk sosial yaitu tidak bisa hidup tanpa bantuan orang lain sekalipun itu adalah orang yang berperkara dengan dirinya.

Dari hasil wawancara dengan hakim di Pengadilan Agama Sengkang Kelas 1B, diperoleh sebuah kesimpulan mengapa dalam penyelesaian sengketa kewarisan pada Pengadilan Agama Sengkang Kelas I B masih kurang efektif, ini disebabkan beberapa faktor yaitu:

1. Para pihak atau salah satu pihak tidak hadir untuk mengikuti proses mediasi
2. Tidak ada yang mau mengalah
3. Kualitas Mediator

Sebagai metode penyelesaian sengketa secara damai, mediasi mempunyai peluang besar untuk berkembang di Indonesia. Dengan adat ketimuran yang masih mengakar, masyarakat lebih mengutamakan tetap terjalinnya hubungan silaturahmi antar keluarga atau hubungan dengan rekan bisnis daripada keuntungan sesaat apabila timbul sengketa. Menyelesaikan sengketa di Pengadilan mungkin menghasilkan keuntungan besar apabila menang, namun hubungan juga menjadi rusak. Menyelamatkan muka (*face saving*) atau nama baik seseorang adalah hal penting yang kadang lebih utama dalam proses penyelesaian sengketa di Negara berbudaya timur, termasuk Indonesia. Masyarakat Indonesia juga lebih mengutamakan harmoni komunal di atas kepentingan individu. Walaupun satu pihak merasa dirinya lebih benar dalam substansi perkara, namun demi menjaga keselarasan dan ketentraman masyarakat, pihak tersebut dapat diminta untuk mengalah. Untuk itu, pihak ketiga sebagai

penengah sengketa haruslah orang yang dihormati karena reputasi dan integritas di tengah masyarakat untuk menjaga norma dan etika yang berlaku.<sup>23</sup>

#### ***D. Peranan Mediator Dalam Penyelesaian Sengketa Kewarisan Pada Pengadilan Agama Sengkang Kelas I B***

Secara substansi, mediasi dalam perkara kewarisan di Pengadilan Agama Sengkang Kelas I B telah dijalankan dengan baik dan sungguh-sungguh, namun hasil yang dicapai kurang efektif karena banyak faktor yang menghambat mediator dalam penyelesaian sengketa kewarisan. Faktornya antara lain sebagai berikut:

1. Para pihak atau salah satu pihak tidak hadir untuk mengikuti proses mediasi

Ketidakhadiran para pihak dalam proses mediasi sangatlah menentukan proses mediasi, karena tidak mungkin proses mediasi dapat dilaksanakan, jika salah satu pihak/para pihak tidak hadir pada pertemuan yang telah dijadwalkan. Hal inilah yang sering terjadi di Pengadilan Agama Sengkang Kelas 1B sehingga berpengaruh pada minimnya jumlah perkara yang berhasil dimediasi.

Tidak sedikit tergugat yang absen di persidangan apakah sengaja atau tidak, yang menjadikan tidak dapatnya dilakukan proses mediasi yang dapat menjadi proses penghalang penegakan hukum karena mediasi tidak dapat dilaksanakan, bahkan bisa menjadi senjata jitu bagi orang-orang nakal untuk terhindar dari hukuman yang diberikan hakim.

Kehadiran para pihak juga akan menunjukkan itikad baik dari para pihak dalam menempuh proses perdamaian, sehingga para pihak atau salah satu pihak

---

<sup>23</sup> Fatahillah A. Syukur, *Mediasi Yudisial di Indonesia: Peluang dan Tantangan dalam Memajukan Sistem Peradilan*, h. 4.

tidak mau menghadiri pertemuan yang telah dijadwalkan, maka tidak dapat dipandang bahwa para pihak tidak memiliki itikad baik untuk menyelesaikan sengketanya secara damai.

Seandainya di awal pertemuan tidak ditentukan jadwal pertemuan secara berkala, maka atas ketidakhadiran salah satu pihak, mediator harus meminta bantuan hakim pemeriksa perkara untuk memanggil secara patut dengan bantuan juru sita pengadilan, supaya para pihak tersebut hadir pada waktu dan tempat yang telah ditentukan. Jika setelah di lakukan dua kali panggilan secara patut, pihak tersebut tetap tidak hadir tanpa alasan yang sah, maka mediator wajib untuk menyatakan bahwa proses mediasinya telah gagal dan menyerahkan kembali perkaranya kepada majelis hakim yang menyidangkan perkaranya. Ketentuan seperti itu diatur untuk menghindari proses yang bertele-tele, jika para pihak memang tidak bersungguh-sungguh untuk menempuh proses perdamaian.<sup>24</sup>

## 2. Tidak Ada Yang Mau Mengalah

Jika salah satu pihak tidak ada yang mau mengalah maka sulit untuk mendamaikan karena keegoan masing-masing pihak untuk menang.<sup>25</sup> Maka dari itu para pihak yang bersengketa akan berusaha untuk mempertahankan prinsipnya masing-masing, karena perkara kewarisan sendiri merupakan sengketa yang menyangkut masalah harta.

## 3. Kualitas Mediator

---

<sup>24</sup> Restiana, "Penyelesaian Sengketa Tanah Warisan Melalui Mediasi (Studi Kasus Di Pengadilan Agama Watampone Kelas 1B)", *Skripsi* (Makassar: Fak. Syariah dan Hukum UIN Alauddin, 2016), h. 110.

<sup>25</sup> Hasil wawancara dengan Drs. Idris, M.H.I., Hakim Pengadilan Agama Sengkang pada tanggal 8 Juni 2017.

Masih rendahnya kualitas hakim yang menjalankan fungsi mediator. Masih banyak hakim, terutama di Pengadilan yang berada di pelosok daerah tanah air, yang belum mendapat kesempatan mengikuti pelatihan sertifikasi mediator oleh lembaga terakreditasi di luar Mahkamah Agung RI, walaupun ada beberapa pengecualian sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya. Mahkamah Agung RI belum bisa mengadakan pelatihan mediasi yang cukup untuk semua hakim dikarenakan mediasi belum menjadi program prioritas yang memperlihatkan kurangnya dukungan Mahkamah Agung RI.<sup>26</sup>

Untuk mengetahui secara jelas mengenai peranan mediator dalam penyelesaian sengketa kewarisan pada Pengadilan Agama Sengkang Kelas I B dapat dilihat dari hasil wawancara tertulis dengan informan. Berikut ini adalah pertanyaan dan jawaban dari informan tentang peranan mediator dalam penyelesaian sengketa kewarisan Pada Pengadilan Agama Sengkang Kelas I B.

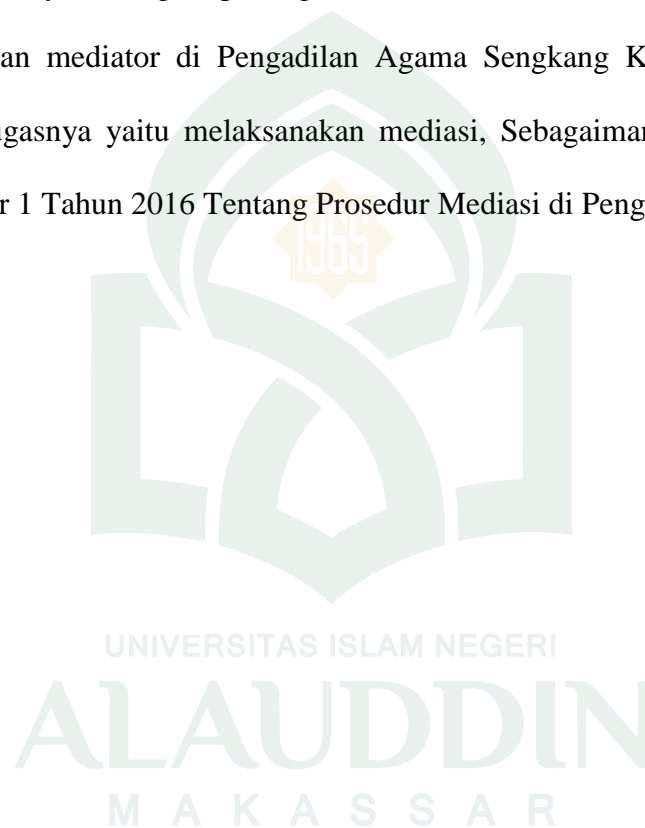
Adapun pertanyaan dan jawaban dari informan/narasumber bagaimana peranan mediator dalam penyelesaian sengketa kewarisan, menurut Dra. Narniati, S.H., M.H. bahwa mediator itu hanya bertugas untuk melaksanakan mediasi, dalam melaksanakan mediasi mediator bertindak sebagai pihak ketiga yang netral dalam mendamaikan para pihak yang bersengketa. Sedangkan menurut Drs. Idris, M.HI ia mengatakan bahwa sangat membantu dalam penyelesaian sengketa kewarisan, dengan adanya mediator sebagai penengah di antara para pihak yang bersengketa maka kemungkinan bisa terjadinya kesepakatan yakni damai, hal ini sama dengan yang dikemukakan oleh Drs. Muh. Arsyad, S.Ag. Adapun menurut

---

<sup>26</sup>Fatahillah A. Syukur, *Mediasi Yudisial di Indonesia: Peluang dan Tantangan dalam Memajukan Sistem Peradilan*, h. 70.

Drs. H. Makka A adalah peranan mediator bisa efektif apabila pihak berperkara tidak egoistik, kalau salah satu pihak egois atau tidak ada yang mau mengalah maka sulit untuk mendamaikan, namun apabila sebaliknya kemungkinan bisa damai.

Berdasarkan hasil wawancara dengan beberapa mediator, bahwa peranan mediator itu hanya sebagai penengah diantara kedua belah pihak yang bersengketa. Dan mediator di Pengadilan Agama Sengkang Kelas I B sudah menjalankan tugasnya yaitu melaksanakan mediasi, Sebagaimana diatur dalam PERMA Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan.



## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan bahasan yang telah diuraikan dalam skripsi ini, maka dapat ditarik kesimpulan diantaranya:

1. Proses Mediasi Dalam Penyelesaian Sengketa Kewarisan di Pengadilan Agama Sengkang Kelas I B dilaksanakan setelah penunjukan mediator terlebih dahulu untuk proses mendamaikannya, bila mana keduanya sepakat untuk mencabut gugatannya maka mediasi dikatakan berhasil, dan apabila telah masuk dalam proses mediasi namun ada salah satu pihak yang tidak menginginkan hal tersebut atau telah beberapa kali dipanggil secara patut dan tidak pernah hadir dalam proses mediasi tersebut, maka mediasi dikatakan gagal dan mediator yang di tunjuk memberikan keterangan secara tertulis berkaitan dengan proses mediasi yang gagal karena tidak adanya kesepakatan diantara para pihak.
2. Efektivitas yang dicapai mediator dalam menyelesaikan sengketa kewarisan di Pengadilan Agama Sengkang Kelas I B kurang efektif disebabkan karena (a) Para pihak atau salah satu pihak tidak hadir untuk mengikuti proses mediasi, (b) Tidak ada yang mau mengalah, dan (c) Kualitas mediator.
3. Peranan Mediator dalam penyelesaian sengketa kewarisan pada Pengadilan Agama Sengkang Kelas I B, mediator sudah berperan dalam penyelesaian sengketa kewarisan karena mediator sudah membantu para pihak untuk damai dalam proses mediasi, namun apabila mediator sudah



melaksanakan tugasnya yaitu memediasi para pihak, kembali lagi ke para pihak apakah dia mau damai atau tidak.

***B. Implikasi Penelitian***

1. Dengan adanya proses mediasi yang dilakukan oleh mediator di Pengadilan di kehendaki adanya peningkatan dalam proses penyelesaian perkara utamanya dalam mediasi. Mediator harus berperan dalam melakukan penyelesaian sengketa yang terbaik agar proses mediasi berjalan maksimal, agar para pihak merasa puas dan tidak ada pihak yang dirugikan.
2. Penelitian ini diharapkan dapat berdampak pada peningkatan terhadap keberhasilan mediator dalam memediasi pihak yang berperkara di Pengadilan Agama.

## DAFTAR PUSTAKA

Al-Qur'an.

Anwar, Desy. *Kamus Lengkap Bahasa Indonesia*. Surabaya: Amelia, 2003.

Anshori, Abdul Ghofur. *Hukum Kewarisan Islam Di Indonesia (Eksistensi dan Adaptasi)*. Cet. I; Yogyakarta: Gadjah Mada University 2012.

Ali, Zainuddin. *Hukum Perdata Islam Di Indonesia*. Cet. I; Jakarta: Sinar Grafika 2006.

Ali, Zainuddin. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika, 2009.

As-Suyuthi Imam. *Asbabun Nuzul Sebab-Sebab Turunnya Ayat AL-QUR'AN*. Cet. I; Jakarta: Dar Al-Fajr lit At-Turats- Kairo, 2014.

Daud Ali, Mohammad. *Hukum Islam*. Jakarta: Rajawali Pers, 1991.

Echols Jhon dan Hasan Shadily. *Kamus Inggris Indonesia*. Cet. XXV; Jakarta: Gramedia Pustaka Umum, 2003.

Gunawan dkk. *Hukum Arbitrase*. Cet. III; Jakarta: Rajawali Pers, 2003.

HS, Salim. *Pengantar Hukum Perdata Tertulis (BW)*. Jakarta: Sinar Grafika, 2001.

Kementrian Agama Republik Indonesia, *Al-Quran dan Terjemahnya*. Jakarta: Yayasan Penyelenggara Penerjemah Al-Qur'an, 2002.

Kementrian Agama Republik Indonesia, *Mushaf Al-Qur'an Terjemah*. Jakarta: Al-Huda Kelompok Gema Insani, 2002.

Lubis, Suhrawardi K. dkk, *Hukum Waris Islam (Lengkap & Praktis)*,. Jakarta: Sinar Grafika, t.th.

Manaf, Abdul. *Putusan Peninjauan Kembali Dalam Perkara Perceraian Dan Kewarisan*. Cet.I; Bandung: Mandar Maju, 2013.

Marbun, Rocky dkk. *Kamus Hukum Lengkap*. Jakarta: Visimedia, 2012.

Mustari, Abdillah. *Hukum Waris (Perbandingan Hukum Islam Dan Undang-undang Hukum Perdata Barat (Burgerlijk Wetboek))*. Cet. I; Makassar: Alauddin University Press, 2014.

M. Bakry, Muammar. *Akuntansi Dasar Mawaris (Cara Cepat Membagi Harta Pusaka Secara Syar'i)*. Cet. I; Jakarta: Alauddin University Press, 2014.

Nessa, M. Rum. *Membumikan Hukum Acara Peradilan Agama Di Indonesia*. Cet. I; Yogyakarta: UII Press, 2016.

Perangin, Effendi. *Hukum Waris*. Jakarta: Rajawali Pers, 2008.

Rasyid, Roihan A. *Hukum Acara Peradilan Agama*. Ed. 2 Cet. 10; Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2003).

- Republik Indonesia, *Undang-undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Peradilan Agama*. Jakarta: Cemerlang, 2008.
- , *Undang-undang Perkawinan Indonesia (Dilengkapi Dengan Kompilasi Hukum Islam Indonesia)*. Jakarta: Cemerlang, t.th.
- Republik Indonesia. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan & Kompilasi Hukum Islam. Cet. I; t.t. Grahamedia Press, 2014.
- Restiana, “Penyelesaian Sengketa Tanah Warisan Melalui Mediasi. (Studi Kasus Di Pengadilan Agama Watampone Kelas 1B)”. *Skripsi*. Makassar: Program Sarjana UIN, 2016.
- Rofiq, Ahmad. *Hukum Islam Di Indonesia*. Cet. III; Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1998.
- Sadi Is, Muhammad. *Pengantar Ilmu Hukum*. Cet. I; Jakarta: Prenada Media Group, 2015.
- Saebani, Beni Ahmad. *Fiqh Mawaris*. Cet. I; Bandung: Pustaka Setia, 2009.
- Shihab M. Quraish. *Tafsir Al-Misbah Pesan, Kesan dan Keserasian Al-Qur'an*. Cet. VIII; Jakarta: Penerbit Lentera Hati, 2007.
- Supardin, *Fikih Peradilan Agama Di Indonesia ( Rekonsrtuksi Materi Perkara Tertentu)*. Cet. I; Makassar: 2014.
- Syarifuddin, Amir. *Hukum Kewarisan Islam*. Cet. V; Jakarta: Prenada Media Group 2015.
- Syukur, Fatahillah A. *Mediasi Yudisial di Indonesia: Peluang dan Tantangan dalam Memajukan Sistem Peradilan*. Cet. 1; Bandung: CV. Mandar Maju, 2012.
- Talli, Abd. Halim. *Peradilan Indonesia (Berketuhanan Yang Maha Esa)*. Cet. I; Makassar: Alauddin University Press, 2013.
- Tim Penyusun Kamus Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka 2000.
- Tim Pustaka Phoenix. *Kamus Besar Bahasa Indonesia(Edisi Baru)*. Cet. VI; Jakarta: Media Pustaka Phoenix, 2012.
- Zaidah, Yuzna. *Penyelesaian Sengketa Melalui Peradilan Dan Arbitrase Syari'ah Di Indonesia*. Cet. II; Yogyakarta: Aswaja Pressindo, 2015.

L

A

M

P

I

R

A

N





**KEMENTERIAN AGAMA**  
**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAKASSAR**  
**FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM**

Kampus I Jl. Slt. Alauddin No. 63 Makassar Tlp. (0411) 864924 Fax 864923  
Kampus II Jl. HM. Yasin Limpo No. 36 Samata Sungguminasa – Gowa Tlp. 424835 Fax.  
424836

Nomor : SI.1/PP.00.9/1958/2017

Samata, 29 Mei 2017

Sifat : Penting

Lamp : -

Hal : **PERMOHONAN IZIN PENELITIAN**

*Kepada Yth*

**Ketua Pengadilan Agama Sengkang**  
**Di**

**Sengkang**

Assalamu 'Alaikum Wr. Wb.

Dengan hormat disampaikan bahwa Mahasiswa UIN Alauddin Makassar yang tersebut namanya dibawah ini :

Nama	: Andi Musfira Asnur
Nim	: 10100113063
Fakultas/jurusan	: Syariah dan Hukum /Peradilan
Semester	: VIII (Delapan)
Alamat	: Perumahan Taman Zarindah Tamarunang Blok H/19, Samata-Gowa

Bermaksud melakukan penelitian dalam rangka penyusunan skripsi sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana. Adapun judul skripsi :

"PERANAN MEDIATOR DALAM PENYELESAIAN SENGKETA KEWARISAN PADA PENGADILAN AGAMA SENGKANG KELAS I B".

Dengan Dosen Pembimbing : 1. Dr. Hj. Nurnaningsih, M.A.

2. Dr. Hj. Patimah, M.Ag.

Untuk maksud tersebut kami mengharapkan kiranya kepada mahasiswa yang bersangkutan dapat diberi izin untuk melakukan penelitian di kantor Pengadilan Agama Sengkang Kelas I B. terhitung mulai tanggal 5 Juni 2017 s/d 5 Juli 2017.

Demikian harapan kami dan terima kasih.

Wassalam  
Kepada Yth  
Rektor  
Dekan  
  
Prof. Dr. Darussalam., M.Ag  
NIP. 19621016199031003

Tembusan :

Yth. Rektor UIN Alauddin Makassar Di Samata Gowa.



## PENGADILAN AGAMA SENGKANG

JL. Akasia Sengkang Telp. (0485) 21891 /Fax. (0485) 21848

e-mail : pasengkang@yahoo.co.id

Kabupaten Wajo 90911

### SURAT KETERANGAN PENELITIAN

Nomor : W.20-A3/ 981 /TL.00/VI/2017

Yang bertanda tangan di bawah ini, Dra. Hj. Rudianah Halim, S.H, Ketua Pengadilan Agama Sengkang menerangkan bahwa:

Nama : ANDI MUSFIRA ASNUR  
NIM : 10100113063  
Program Studi : Hukum Acara Peradilan dan Kekeluargaan  
Fakultas : Syariah dan Hukum UIN Alauddin Makassar

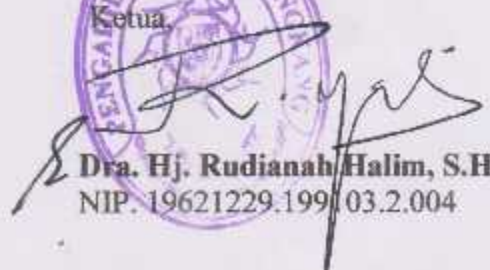
Benar yang bersangkutan telah mengadakan penelitian pada Kantor Pengadilan Agama Sengkang, dalam rangka penulisan skripsi yang berjudul: "**PERANAN MEDIATOR DALAM PENYELESAIAN SENGKETA KEWARISAN PADA PENGADILAN AGAMA SENGKANG KELAS IB**".

Setelah penulisan skripsi tersebut selesai, diharapkan kepada yang bersangkutan untuk menyeter 1 exemplar ke Perpustakaan Pengadilan Agama Sengkang.

Demikian surat keterangan ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Sengkang, 20 Juni 2017

Ketua

  
Dra. Hj. Rudianah Halim, S.H.  
NIP. 19621229.199103.2.004



### Surat Keterangan Wawancara

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Dra. Hj. Hasniati D. M. H.  
Pekerjaan/Jabatan : Hakim  
Alamat : Jl. Beringin

Benar telah memberikan keterangan kepada:

Nama : Andi Musfira Asnur  
NIM : 10100113063  
Jurusan/Prodi : Peradilan/Hukum Acara Peradilan dan Kekeluargaan  
Alamat : Perumahan Taman Zarindah Tamarunang Blok H/19,  
Samata-Gowa

Bahwa nama tersebut di atas benar telah melakukan wawancara berkaitan dengan judul skripsi "PERANAN MEDIATOR DALAM PENYELESAIAN SENGKETA KEWARISAN PADA PENGADILAN AGAMA SENGKANG KELAS I B".

Demikianlah surat ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI

ALA UDDIN  
MAKASSAR

Sengkang, 8 Juli 2017



Dra. Hasniati D. M. H.

### Surat Keterangan Wawancara

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Drs. Ldris, M.Hr  
Pekerjaan/Jabatan : Hakim PA, Sengkang  
Alamat : Jl. Hosni Mubarak kel. Mestakelleg

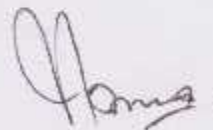
Benar telah memberikan keterangan kepada:

Nama : Andi Musfira Asnur  
NIM : 10100113063  
Jurusan/Prodi : Peradilan/Hukum Acara Peradilan dan Kekeluargaan  
Alamat : Perumahan Taman Zarindah Tamarunang Blok H/19,  
Samata-Gowa

Bahwa nama tersebut di atas benar telah melakukan wawancara berkaitan dengan judul skripsi "PERANAN MEDIATOR DALAM PENYELESAIAN SENGKETA KEWARISAN PADA PENGADILAN AGAMA SENGKANG KELAS I B".

Demikianlah surat ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
ALA UDDIN  
M A K A S S  
Sengkang, 0-6-2017





## Surat Keterangan Wawancara

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Dra. Hj. ST. Rasmah, M.H  
Pekerjaan/Jabatan : Hakim  
Alamat : Jl. Beringin

Benar telah memberikan keterangan kepada:

Nama : Andi Musfira Asnur  
NIM : 10100113063  
Jurusan/Prodi : Peradilan/Hukum Acara Peradilan dan Kekeluargaan  
Alamat : Perumahan Taman Zarindah Tamarunang Blok H/19,  
Samata-Gowa

Bahwa nama tersebut di atas benar telah melakukan wawancara berkaitan dengan judul skripsi "PERANAN MEDIATOR DALAM PENYELESAIAN SENGKETA KEWARISAN PADA PENGADILAN AGAMA SENGKANG KELAS I B".

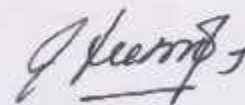
Demikianlah surat ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI

ALA UDDIN

MAKASSAR

Sengkang, 9 Juni 2017



### Surat Keterangan Wawancara

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Dra Hj Nikema, MH

Pekerjaan/Jabatan : Hakim

Alamat : Jl. Beringin Sengkang

Benar telah memberikan keterangan kepada:

Nama : Andi Musfira Asnur

NIM : 10100113063

Jurusan/Prodi : Peradilan/Hukum Acara Peradilan dan Kekeluargaan

Alamat : Perumahan Taman Zarindah Tamarunang Blok H/19,  
Samata-Gowa

Bahwa nama tersebut di atas benar telah melakukan wawancara berkaitan dengan judul skripsi "PERANAN MEDIATOR DALAM PENYELESAIAN SENGKETA KEWARISAN PADA PENGADILAN AGAMA SENGKANG KELAS I B".

Demikianlah surat ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI

ALA UDDIN

MAKASSAR

Sengkang, 8 Juni 2017



Dra. Hj. Nikema, MH

## Surat Keterangan Wawancara

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Dra Hj. Jusmah  
Pekerjaan/Jabatan : Hakim  
Alamat : Jl. Barungian Lt. Alasia

Benar telah memberikan keterangan kepada:

Nama : Andi Musfira Asnur  
NIM : 10100113063  
Jurusan/Prodi : Peradilan/Hukum Acara Peradilan dan Kekeluargaan  
Alamat : Perumahan Taman Zarindah Tamarunang Blok H/19,  
Samata-Gowa

Bahwa nama tersebut di atas benar telah melakukan wawancara berkaitan dengan judul skripsi "PERANAN MEDIATOR DALAM PENYELESAIAN SENGKETA KEWARISAN PADA PENGADILAN AGAMA SENGKANG KELAS I B".

Demikianlah surat ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
ALA UDDIN  
M A K A S S Sengkang, 9 Juni 2017



Dra Hj. Jusmah

### Surat Keterangan Wawancara

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Dra. Hj. Dzakiyyah MH  
Pekerjaan/Jabatan : Hakim  
Alamat : JL. Belpinjen Sengkang Kab. Wajo


Benar telah memberikan keterangan kepada:

Nama : Andi Musfira Asnur  
NIM : 10100113063  
Jurusan/Prodi : Peradilan/Hukum Acara Peradilan dan Kekeluargaan  
Alamat : Perumahan Taman Zarindah Tamarunang Blok H/19,  
Samata-Gowa

Bahwa nama tersebut di atas benar telah melakukan wawancara berkaitan dengan judul skripsi "PERANAN MEDIATOR DALAM PENYELESAIAN SENGKETA KEWARISAN PADA PENGADILAN AGAMA SENGKANG KELAS IB".

Demikianlah surat ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Sengkang, 8 - 6 2017

  
Dra. Hj. Dzakiyyah MH

## Surat Keterangan Wawancara

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Drs. Muh. Arsyad, S.Ag.

Pekerjaan/Jabatan : Hakim Pengadilan Agama Sengkang

Alamat : Jln. S. Hasanuddin, (MES Pengadilan Agama Sengkang)

Benar telah memberikan keterangan kepada:

Nama : Andi Musfira Asnur

NIM : 10100113063

Jurusan/Prodi : Peradilan/Hukum Acara Peradilan dan Kekeluargaan

Alamat : Perumahan Taman Zarindah Tamarunang Blok H/19, Samata  
-Gowa

Bahwa nama tersebut di atas benar telah melakukan wawancara berkaitan dengan judul skripsi "PERANAN MEDIATOR DALAM PENYELESAIAN SENGKETA KEWARISAN PADA PENGADILAN AGAMA SENGKANG KELAS I B".

Demikianlah surat ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Sengkang, 2 Juni 2017



Drs. Muh. Arsyad, S.Ag.

NIP: 19541231 198103 1 094



## Surat Keterangan Wawancara

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Drs. H. Makka A.

Pekerjaan/Jabatan : Hakim Pengadilan Agama Sengkang

Alamat : Jln. S. Hasanuddin, (MES Pengadilan Agama Sengkang)

Benar telah memberikan keterangan kepada:

Nama : Andi Musfira Asnur

NIM : 10100113063

Jurusan/Prodi : Peradilan/Hukum Acara Peradilan dan Kekeluargaan

Alamat : Perumahan Taman Zarindah Tamarunang Blok H/19, Samata

-Gowa

Bahwa nama tersebut di atas benar telah melakukan wawancara berkaitan dengan judul skripsi "PERANAN MEDIATOR DALAM PENYELESAIAN SENGKETA KEWARISAN PADA PENGADILAN AGAMA SENGKANG KELAS I B".

Demikianlah surat ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Sengkang, 20 Juni 2017

  
Drs. H. Makka A.

NIP: 19610212 199103 1 005

## Surat Keterangan Wawancara

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Dra. Narniati, S.H., M.H.

Pekerjaan/Jabatan : Hakim Pengadilan Agama Sengkang

Alamat : Jln. Beangin, Lt. Akasia

Benar telah memberikan keterangan kepada:

Nama : Andi Musfira Asnur

NIM : 10100113063

Jurusan/Prodi : Peradilan/Hukum Acara Peradilan dan Kekeluargaan

Alamat : Perumahan Taman Zarindah Tamarunang Blok H/19, Samata  
-Gowa

Bahwa nama tersebut di atas benar telah melakukan wawancara berkaitan dengan judul skripsi "PERANAN MEDIATOR DALAM PENYELESAIAN SENGKETA KEWARISAN PADA PENGADILAN AGAMA SENGKANG KELAS I B".

Demikianlah surat ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI

ALAUDDIN

MAKASSAR

Sengkang, 20 Juni 2017



Dra. Narniati, S.H., M.H.

NIP: 19621211 198903 2 004

## Surat Keterangan Wawancara

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Dra. Hj. Farida Mustafa  
Pekerjaan/Jabatan : Hakim Pengadilan Agama Sengkang  
Alamat : Jln. Benangin

Benar telah memberikan keterangan kepada:

Nama : Andi Musfira Asnur  
NIM : 10100113063  
Jurusan/Prodi : Peradilan/Hukum Acara Peradilan dan Kekeluargaan  
Alamat : Perumahan Taman Zarindah Tamarunang Blok H/19, Samata  
-Gowa

Bahwa nama tersebut di atas benar telah melakukan wawancara berkaitan dengan judul skripsi "PERANAN MEDIATOR DALAM PENYELESAIAN SENGKETA KEWARISAN PADA PENGADILAN AGAMA SENGKANG KELAS I B".

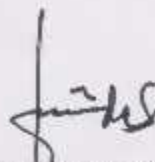
Demikianlah surat ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI

ALA UDDIN

MAKASSARA

Sengkang, 20 Juni 2017



Dra. Hj. Farida Mustafa

NIP: 19541231 198303 2 014



## FOTO-FOTO PENELITIAN



Gambar 1.1. Kantor Pengadilan Agama Sengkang (Lokasi Penelitian)



Gambar 1.2. Peta Wilayah Hukum Pengadilan Agama Sengkang



Gambar 1.3. Struktur Organisasi Pengadilan Agama Sengkang Kelas I B



**DAFTAR HAKIM MEDIATOR  
PENGADILAN AGAMA SENGKANG KLAS 1 B**  
Nomor : W20-A3/45/Kp.00.3/SK/II/2017

NO.	NAMA	CDU/ RUANG	JABATAN	PENDIDIKAN
1.	Dra. Hj. Dzakirah, M.H.	IV/c	Hakim Madya Utama	S2
2.	Hj. St. Ajah, S.H.	IV/b	Hakim Madya Muda	S1
3.	Dra. Hj. Husniati D., M.H.	IV/c	Hakim Madya Utama	S2
4.	Dra. Hj. Nikma, M.H.	IV/c	Hakim Madya Utama	S2
5.	Drs. Idris, M. HI	IV/c	Hakim Madya Utama	S1
6.	Drs. M. Yasin Paddu	IV/c	Hakim Madya Utama	S1
7.	Dra. Hj. Fanda Mustafa	IV/c	Hakim Madya Utama	S1
8.	Dra. Hj. Aumamah	IV/c	Hakim Madya Utama	S1
9.	Drs. H. Makka A.	IV/b	Hakim Madya Muda	S1
10.	Dra. Hj. St. Hasmah, M.H.	IV/c	Hakim Madya Utama	S2
11.	Drs. Muhi. Arsyad, S.Ag	IV/b	Hakim Madya Muda	S1
12.	Dra. Hj. Zahrah ZR	IV/c	Hakim Madya Utama	S1
13.	Dra. Hj. Narnati, S.H., M.H.	IV/c	Hakim Madya Utama	S2

Disusun di : Sengkang  
Pada : Tanggal 1 Februari 2017

Ketua Pengadilan Agama Sengkang  
Dra. Hj. Narnati, S.H., M.H.  
Nip. 19621229 1993 03 2004

*Gambar 1.4. Daftar Hakim Mediator Pengadilan Agama Sengkang Kelas I B*



*Gambar 1.5. Ruang Arsip Pengadilan Agama Sengkang Kelas I B*



*Gambar 1.6. Ruang Pelayanan Pengadilan Agama Sengkang*





*Gambar 1.7. Wawancara Human Informan Drs. H. Makka A.*



*Gambar 1.8. Wawancara Human Informan*



*Gambar 1.9. Wawancara Human Informan*



*Gambar 1.10. Wawancara Human Informan Drs. Idris, M.HI.*


## PERSETUJUAN PEMBIMBING

Proposal skripsi yang berjudul "PERANAN MEDIATOR DALAM PENYELESAIAN SENGKETA KEWARISAN PADA PENGADILAN AGAMA SENGKANG KELAS I B" yang disusun oleh Andi Mustira Asnur, NIM: 10100113063, mahasiswa Prodi Hukum Acara Peradilan dan Kekeluargaan Jurusan Peradilan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Alauddin Makassar, telah diteliti dan dikoreksi secara seksama serta disetujui untuk diseminarkan (Seminar Proposal).

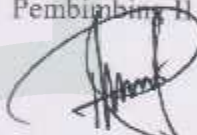
Demikian persetujuan ini diberikan untuk diproses lebih lanjut.

Makassar, 12 Mei 2017 M  
15 Sya'ban 1438 H

Pembimbing I

  
Dr. Hj. Nurhaningsih, M.A.  
NIP. 195504211985032002


Pembimbing II

  
Dr. Hj. Patimah, M.Ag.  
NIP. 196611241994032001

Disetujui oleh:

Ketua Jurusan Peradilan



  
Dr. H. Supardin, M.H.I.  
NIP. 196503021994031003


## PENGESAHAN PROPOSAL SKRIPSI

Proposal skripsi yang berjudul "Peranan Mediator Dalam Penyelesaian Sengketa Kewarisan pada Pengadilan Agama Sengkang Kelas I B" yang disusun oleh Andi Musfira Asnur, NIM: 10100113063, mahasiswa Prodi Hukum Acara Peradilan dan Kekeluargaan Jurusan Peradilan pada Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Alauddin Makassar, telah diuji dan dipertahankan dalam seminar proposal skripsi yang diselenggarakan pada hari Rabu tanggal 17 Mei 2017 M, bertepatan dengan 20 Sya'ban 1438 H, dinyatakan telah dapat diterima sebagai salah satu syarat untuk melaksanakan penelitian (dengan beberapa perbaikan).


Demikian persetujuan ini diberikan untuk diproses lebih lanjut.

Makassar, 24 Mei 2017 M  
27 Sya'ban 1438 H

Pembimbing I

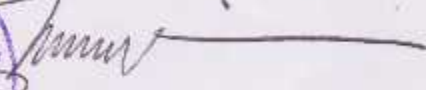
  
**Dr. Hj. Nurnaningsih, M.A.**  
NIP. 195504211985032002

Pembimbing II

  
**Dr. Hj. Patimah, M.Ag.**  
NIP. 196611241994032001

Disahkan oleh:  
Ketua Jurusan Peradilan



  
**Dr. H. Supardin, M.H.I.**  
NIP. 196503021994031003

## PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi yang berjudul "PERANAN MEDIATOR DALAM PENYELESAIAN SENGKETA KEWARISAN PADA PENGADILAN AGAMA SENGKANG KELAS 1B", yang disusun oleh Andi Musfira Asnur, NIM: 10100113063, mahasiswa Prodi Hukum Acara Peradilan dan Kekeluargaan, Jurusan Peradilan pada Fakultas Syariah dan Hukum UIN Alauddin Makassar, telah melaksanakan penelitian, diteliti, dan dikoreksi secara saksama serta disetujui untuk diseminarkan (seminar hasil).

Demikian persetujuan ini diberikan untuk diproses lebih lanjut.

Makassar, 21 Juli 2017 M.  
27 Syawal 1438 H

Pembimbing I



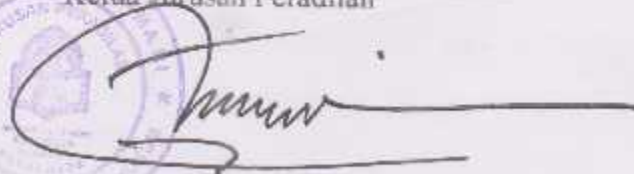
**Dr. Hj. Nurnaningsih, M.A.**  
NIP. 195504211985032002

Pembimbing II



**Dr. Hj. Patimah, M.Ag.**  
NIP. 196611241994032001

Disetujui oleh  
Ketua Jurusan Peradilan



**Dr. H. Supardin, M.H.I.**  
NIP. 196503021994031003



## PERSETUJUAN PEMBIMBING/PENGUJI

Skripsi yang berjudul "PERANAN MEDIATOR DALAM PENYELESAIAN SENGKETA KEWARISAN PADA PENGADILAN AGAMA SENGKANG KELAS 1 B" yang disusun oleh Andi Musfira Asnur, NIM: 10100113063, mahasiswa Prodi Hukum Acara Peradilan dan Kekeluargaan Jurusan Peradilan pada Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Alauddin Makassar, telah diuji dan dipertahankan dalam sidang seminar hasil yang diselenggarakan pada hari Kamis, tanggal 27 Juli 2017 M, bertepatan dengan tanggal 03 Zulkaidah 1438 H, dinyatakan telah diperiksa secara saksama, diteliti, dan disetujui untuk dimunajasyahkan.

Demikian persetujuan ini diberikan untuk diproses lebih lanjut.

Makassar, 02 Agustus 2017 M  
09 Zulkaidah 1438 H

Penguji I : Drs. Hadi Daeng Mapuna, M.Ag. (.....)

Penguji II : Drs. H. Muh. Jamal Jamil, M.Ag. (.....)

Pembimbing I : Dr. H. Supardin, M.H.I. (.....)

Pembimbing II : Dr. Hj. Patimah, M.Ag. (.....)

Disetujui oleh:

Ketua Jurusan Peradilan



Dr. H. Supardin, M.H.I.

NIP. 196503021994031003

## DAFTAR RIWAYAT HIDUP



Penulis skripsi yang berjudul, **“PERANAN MEDIATOR DALAM PENYELESAIAN SENGKETA KEWARISAN PADA PENGADILAN AGAMA SENGKANG KELAS I B”** bernama lengkap Andi Musfira Asnur, Nim: 10100113063, Anak pertama dari 5 bersaudara dari pasangan pasangan Andi Asri S.Pd dengan Ibu Dra. ST. Nurhayati.

Lahir pada tanggal 03 Mei 1995 di Talabangi Kabupaten Bone. Penulis mengawali jenjang pendidikan formal di Taman Kanak-Kanak Pertiwi Padu Palattae, kemudian lanjut di SD INP.12/79 Palattae Kec.Kahu Kabupaten Bone pada tahun 2002-2007, Kemudian lanjut di MTs As’Adiyah Putri 1 Pusat Sengkang di tahun 2007-2010, kemudian melanjutkan pendidikannya di Madrasah Aliyah As’Adiyah Putri Pusat Sengkang Kabupaten Wajo tahun 2010-2013.

Di tahun yang sama, penulis mendaftar di Universitas Islam Negeri (UIN) Alauddin Makassar, Penulis lulus di UIN Alauddin tepatnya jurusan Peradilan Agama. Rasa syukur tak henti penulis ucapkan, karena diberikan kesempatan untuk mengecap pendidikan Perguruan Tinggi di UIN Alauddin dan berharap dikemudian hari ilmu yang diberikan oleh baik dosen, maupun teman seperjuangan Jurusan Peradilan Agama dapat menjadi bekal dunia dan akhirat, terlebih dengan mengamalkannya pula. Teruntuk kedua orang tua beserta adik-adik terima kasih atas semuanya yang kalian berikan dan untuk keluarga sahabat teman seperjuangan terima kasih tidak dapat penulis sebutkan satu persatu.